

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN  
SANTASI BERBASIS MASYARAKAT (PSBM) DI DESA  
BLIMBING KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
**Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)**

**Disusun Oleh :**  
**MUCHAMMAD AFIF**  
**1501046058**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2019**



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7606405  
Fax.7624691 Semarang 50185

---

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp. : 5 (lima) Eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Muchammad Afif  
NIM : 1501046058  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam  
Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PSBM) di Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.  
Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bidang Substansi Materi

Semarang, 02 Desember 2019  
Pembimbing,  
Bidang Metodologi dan Tata Tulis

Dr. Agus Riyadi, M.S.I  
NIP. 19800816 200710 1 003

Suprihatiningih, S.Ag., M.Si  
NIP. 19760510 200501 2 001



SKRIPSI

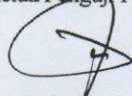
**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SANITASI  
BERBASIS MASYARAKAT (PSBM) DI DESA BLIMBING  
KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL**

Disusun Oleh:  
Muchammad Afif  
1501046058

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 11 Desember 2019 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Sosial (S.Sos)

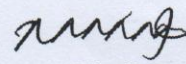
Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I



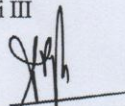
Dr. Saifudin, M.Ag.  
NIP. 19751203 200312 1 002

Sekretaris/Penguji II



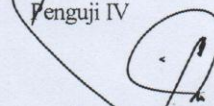
Dr. Agus Riyadi, S.Sos.I, M.S.I.  
NIP. 19800816 200710 1 003

Penguji III



Abdul Ghori, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 19770709 200501 1 003

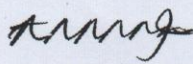
Penguji IV



Drs. Sugiarto, M.Si.  
NIP. 19571013 198601 1 001

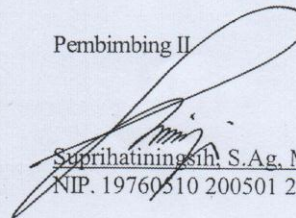
Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Agus Riyadi, S.Sos.I, M.S.I.  
NIP. 19800816 200710 1 003

Pembimbing II



Suprihatiningsih, S.Ag, M.Si.  
NIP. 19760510 200501 2 001

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
pada tanggal 18 Desember 2019.



Dislyas Supena, M.Ag.  
NIP. 19700220 199410 200112 1 003

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 02 Desember 2019



Muchammad Afif

NIM. 1501046058



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya bagi kita semua khususnya bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada pahlawan revolusioner Baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh umat manusia.

Akhirnya, dengan selesainya penelitian yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PSBM) di Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal”, peneliti mengucapkan syukur *alhamdulillah* kepada Allah Swt, semoga membawa manfaat dan berkah dunia akhirat. Tidak lupa dengan kerendahan dan ketulusan hati, peneliti juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-bearnyakepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Ilyas Supena, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Sulistio, S.Ag, M.Si dan Bapak Dr. Hatta Abdul Malik, S.Sos.I, M.S.I selaku ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
4. Bapak Dr. Agus Riyadi, S.Sos.I, M.S.I selaku dosen pembimbing I bidang substansi materi serta Ibu Suprihatiningsih, S.Ag, M.Si, selaku dosen pembimbing II metodologi dan tata tulis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Kepala Desa Blimbing, Ketua BUMDes Blimbing beserta pengurusnya. Serta para masyarakat Desa Blimbing yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data penelitian.

6. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
8. Kedua orang tuaku, Bapak Taruki dan Ibu Sunariani Serta kakak ku Muchammad Zaed Arifin, yang selalu memberikan do'a dan dukungan baik materil maupun nonmaterial.
9. Sahabat-sahabatku khususnya sahabat seperjuangan di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam angkatan 2015, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo yang selalu mendukungku dan menyemangatiku dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 02 Desember 2019

Penyusun,

Muchammad Afif  
NIM: 1501046058

**“PERSEMBAHAN”**

**Karya ini saya persembahkan untuk:**

**Kedua Orang Tuaku Tercinta Bapak Taruki dan Ibu Sunar**

**Kakakku Muchammad Zaed Arifin**

## MOTTO

الإِسْتِقَامَةُ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ كَرَامَةٍ

“Istiqomah lebih utama daripada seribu karomah”



## ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PSBM) di Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal”. Penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk mengetahui tahapan partisipasi masyarakat pada program pengelolaan sanitasi yang ada di Desa Blimbing guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program sanitasi di Indonesia pada awalnya mengalami stagnasi hasil dari banyaknya proses sanitasi yang gagal. Keadaan ini terjadi dikarenakan pembangunan masih berorientasi pada target fisik sebelum berorientasi pada perubahan perilaku masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam hal menjaga kesehatan kebersihan lingkungan, maka partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat guna membangun dan juga mengembangkan kualitas hidup manusia serta meningkatkan kesehatan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat dan dampak partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dengan pendekatan sosiologi teori perilaku. Teori perilaku dibangun untuk menerapkan prinsip psikologi sosial ke dalam sosiologi yang memusatkan perhatiannya pada hubungan antara akibat dari tingkah laku yang terjadi dalam lingkungan aktor dengan tingkah laku aktor. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa yang peneliti gunakan yaitu dengan menggunakan analisis data dari Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus dengan melalui proses mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Blimbing Kecamatan Boja yaitu dimulai dari tahapan pengambilan keputusan, dibuktikan melalui kehadiran masyarakat dalam rapat guna menyampaikan ide maupun gagasan. Tahapan pelaksanaan, dibuktikan dengan adanya kontribusi tenaga dan materi. Tahapan pengambilan manfaat, dibuktikan dengan manfaat yang diambil setelah proses pengelolaan sanitasi aliran sungai menjadi bersih dan bisa dijadikan tempat wisata. Tahapan evaluasi, dibuktikan melalui masyarakat dan pemerintah desa mengevaluasi hasil pengelolaan sanitasi dan juga mengetahui masalah-masalah yang timbul. (2) hasil partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat yaitu adanya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hal-hal terkait pembangunan prasarana sanitas, dan juga adanya keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan keputusan serta adanya peningkatan kemampuan dari masyarakat yang berpartisipasi secara penuh dalam tahapan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat.

**Kata Kunci:** *Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Sanitasi dan Masyarakat*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>E. Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>8</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>18</b>
<b>A. Teori tentang Partisipasi.....</b>	<b>18</b>
1. Pengertian Partisipasi.....	18
2. Tujuan Partisipasi.....	21
3. Tahapan Partisipasi .....	22
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi .....	24
5. Tipologi Partisipasi .....	26

<b>B. Teori tentang Sanitasi.....</b>	<b>28</b>
1. Pengertian Sanitasi .....	28
2. Ruang Lingkup Sanitasi .....	29
3. Sarana dan PrasaranaSanitasi.....	29
4. Konsep Sanitasi Berbasis Masyarakat .....	30
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
<b>A. Keadaan Lokasi Penelitian .....</b>	<b>34</b>
1. Sejarah Singkat Desa Blimbing .....	34
2. Kondisi Geografis .....	35
3. Kondisi Demografi .....	36
4. Potensi Unggulan Desa Blimbing .....	41
<b>B. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.....</b>	<b>46</b>
<b>C. Hasil Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal .....</b>	<b>52</b>
<b>BAB IV ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SANITASI BERBASIS MASYARAKA (PSBM) DI DESA BLIMBING KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL .....</b>	<b>59</b>
<b>A. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal .....</b>	<b>59</b>
<b>B. Analisis Hasil Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.....</b>	<b>72</b>

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
	<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>78</b>
	<b>B. Saran-saran .....</b>	<b>80</b>
	<b>C. Kata Penutup.....</b>	<b>81</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**CURRICULUM VITAE**



## **DAFTAR TABEL**

1. Tabel 1 Rekapitulasi Penduduk Secara Keseluruhan
2. Tabel 2 Jumlah Penduduk menurut kelompok umur
3. Tabel 3 Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin
4. Tabel 4 Jumlah Penduduk menurut pendidikan
5. Tabel 5 Jumlah Penduduk menurut agama
6. Tabel 6 Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat Indonesia sebagian besar berada di kawasan pedesaan. Di kawasan inilah potensi sumber daya manusia dan alamnya berada, dan juga pemanfaatan sumber daya alam oleh sumber daya manusia akan mampu membawa perubahan yang signifikan terhadap manusia jika bias dikelola dengan cukup baik. Orientasi pembangunan yang menitikberatkan pada pedesaan adalah suatu tindakan yang sangat strategis, karena secara langsung maupun tidak langsung hal itu akan memberikan dampak yang positif dan sangat luas. Selain itu kajian masyarakat sebagai pelaku pembangunan dan potensi utama yang ada di pedesaan, maka desa dalam hal ini akan memegang peranan yang sangat penting dalam suatu program pembangunan.<sup>1</sup> Pembangunan desa dalam tujuannya yaitu untuk meningkatkan standar kualitas hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.<sup>2</sup>

Di dalam merealisasikan tujuan pembangunan, segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secaramaksimal. Bratakusuma mengatakan bahwa paradigma pembangunan yang sangat dikembangkan sekarang ini adalah paradigma pemberdayaan yang berintikan partisipasi masyarakat. Masyarakat

---

<sup>1</sup> Argyo Demartoto, *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*, (Surakarta Sebelas Maret University Press, 2009) hal. 99

<sup>2</sup> Undang-undang No. 6 Tahun 2014 *Tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan*, pasal 83 ayat 4

ditempatkan sebagai pelaku utama dan pemerintah tidak lagi sebagai *provider*, tetapi lebih bertindak sebagai intermediasi dan katalisator segenap pelaksanaan program pembangunan, artinya pemerintah seharusnya memberikan kepercayaan dan kesempatan yang lebih banyak kepada masyarakat didalam menumbuh kembangkan segala potensi yang dimilikinya bersama dengan lingkungannya.<sup>3</sup>

Banyak program pembangunan yang kurang memperoleh antusias dari masyarakat karena kurangnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Di lain pihak juga sering dirasakan kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai kapan dan dalam bentuk apa mereka dapat atau dituntut untuk berpartisipasi. Pemberian kesempatan berpartisipasi kepada masyarakat harus dilandasi oleh pemahaman bahwa masyarakat setempat layak diberi kesempatan karena mereka juga punya hak untuk berpartisipasi dan memanfaatkan setiap kesempatan membangun bagi perbaikan mutu hidupnya.<sup>4</sup>

Salah satu program yang dilaksanakan pemerintah Desa Blimbing untuk membantu menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan juga meningkatkan kesehatan yaitu program pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat (PSBM). Hal ini menjadi penting dan utama dalam upaya pengelolaan lingkungan sebagai keberhasilan suatu program yang dimotori oleh pemerintah desa dan bekerjasama dengan masyarakat setempat. Sanitasi sendiri merupakan upaya pencegahan penyakit dalam hal untuk menjaga kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya. Penyediaan air bersih untuk keperluan mencuci tangan serta penyediaan tempat sampah agar tidak dibuang sembarangan.<sup>5</sup> Sanitasi dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan dan mempertahankan standar dasar atas kondisi lingkungan yang bisa

---

<sup>3</sup> Lucas Orocomna, "*Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa Meristim Distrik Moskona Utara)*", dalam Jurnal Governance. Vol. 5, No. 1, 2013

<sup>4</sup> Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hal. 87

<sup>5</sup> Depkes RI, 2004

mempengaruhi kesejahteraan manusia. Kondisi tersebut mencakup pasokan air yang bersih dan aman, pembuangan limbah yang efisien, perlindungan makanan dari kontaminasi biologis dan kimia, udara yang bersih serta rumah yang bersih dan aman.

Kondisi lingkungan yang baik, bersih, aman dan sehat juga merupakan dasar yang penting untuk membangun desa. Tanpa air yang bersih dan aman, pembuangan limbah yang tanpa aturan, makanan yang kurang sehat, kondisi lingkungan yang tidak cukup bersih memungkinkan terjadi penurunan daya tahan tubuh masyarakat setempat tepatnya dalam hal kesehatan.<sup>6</sup> Apabila sanitasi masyarakat baik maka kebersihan lingkungan pun akan ikut terjaga. Seperti yang kita ketahui dalam agama Islam mengajarkan dan juga menganjurkan kita agar menjaga kebersihan baik lahiriah maupun batiniyah. Dan tidak hanya itu Allah SWT berfirman menyeru kepada umat manusia untuk menjaga bumi dari berbagai kerusakan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ  
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan”. (QS. Al-A’raf: 56).

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah SWT melarang manusia untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi. Larangan berbuat kerusakan tersebut mencakup semua bidang seperti merusak pergaulan, jasmani dan rohani orang lain dan bahkan merusak lingkungan. Bumi ini sudah diciptakan Allah dengan segala kelengkapannya, seperti gunung, lembah, lautan, sungai, daratan, hutan dan lain-lain yang secara keseluruhan ditujukan untuk keperluan manusia agar dapat diolah dan

---

<sup>6</sup> Prastiti Laras Nugraheni, & Rasha, “Penyuluhan Sanitasi Higiene dan PHBS pada Masyarakat Kawasan Candi Batujaya, Sebagai Dasar Membangun Desa Wisata yang Bersih dan Sehat”, dalam Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Vol 1, No. 1, 2019



dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan mereka.<sup>7</sup> Dengan adanya kerusakan tersebut Allah berharap manusia akan sadar dan mereka tidak lagi merusak alam akan tetapi mereka harus menjaga dan memeliharanya. Dengan ditunjuknya manusia sebagai khalifah di bumi, di samping memperoleh hak untuk menggunakan apa yang ada di bumi, mereka juga memikul tanggung jawab yang berat dalam hal mengelolanya. Dari sini dapat terlihat pandangan Islam bahwa bumi memang diperuntukkan bagi manusia, namun manusia tidak boleh memperlakukan bumi dengan semaunya sendiri.

Rasulullah SAW pun mengajarkan agar umat Islam bisa menjadi pelopor dalam hal menjaga kebersihan, baik kebersihan badan, pakaian, maupun lingkungan. Rasulullah dalam hadistnya berkata:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكِرْمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ  
فَنَظَّفُوا أَرَاهُ قَالَ أَفْنَيْتَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ (رواه الترمذی)

Artinya: “Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia maha bersih yang menyukai kebersihan, Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan, Dia maha indah yang menyukai keindahan, karena itu maka bersihkanlah tempat-tempatmu dan janganlah menyerupai orang-orang yahudi”. (HR. Tirmidzi: 2723)

Berdasarkan hadits diatas maka kebersihan, kesucian, dan keindahan merupakan sesuatu yang disukai Allah SWT. Jika melakukan sesuatu yang disukai Allah SWT, tentunya akan mendapatkan nilai di hadapan-Nya, yakni pahala. Dengan kata lain, kotor, sampah yang berserakan, lingkungan yang semrawut dan tidak indah tersebut tidak akan disukai oleh Allah SWT. Sebagai hamba yang taat, tentunya kita terdorong untuk melakukan hal-hal yang disenangi oleh Allah SWT. Untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan tersebut maka dapat dimulai dari merubah perilaku dan kebiasaandiri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun lingkungan dimanapun kita berada. Dan jika kita bisa mewujudkan

---

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah. (Jakarta: Lentera Hati). 2012. hal. 237-238

kebersihan dan keindahan, maka kehidupan kita nantinya pasti akan terasa lebih nyaman. Dalam hadits lain juga disebutkan bahwa:<sup>8</sup>

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ (رواه مسلم)

Artinya: “Bersuci itu ialah sebagian dari iman” (HR. Muslim: 23)

Hadits tersebut menjelaskan bahwasanya kebersihan merupakan sebagian dari iman. Keimanan seseorang akan menjadi lebih lengkap jikalau dia dapat menjaga kebersihan. Hal ini menandakan bahwa seorang muslim sudah mempunyai iman yang cukup sempurna apabila di dalam kehidupannya selalu menjaga diri, tempat tinggal dan lingkungannya dalam keadaan bersih dan suci baik yang bersifat lahiriyah maupun yang bersifat batiniyah.

Program sanitasi di Indonesia pada awalnya mengalami stagnasi hasil dari banyaknya proses sanitasi yang gagal, padahal penyampaian program sanitasi terutama jamban telah lama dilakukan. Keadaan ini terjadi dikarenakan pembangunan masih berorientasi pada target fisik sebelum berorientasi pada perubahan perilaku masyarakat. Kepedulian masyarakat terhadap persoalan proyek sanitasi cenderung menurun.<sup>9</sup> Oleh karena itu untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam hal menjaga kebersihan lingkungan, maka peran partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya dengan ikut terlibat dalam program pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat (PSBM) guna membangun dan juga mengembangkan kualitas hidup serta meningkatkan kesehatan.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan masyarakat juga merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi yang ada di masyarakat, dalam pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu

---

<sup>8</sup> Hadari Nawawi, *Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press). 2006, hal.65-67

<sup>9</sup> Diana Rahmawati, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Mahasiswa*. (Universitas Negeri Yogyakarta). 2013, hal. 138

peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada di dalam masyarakat. Melaksanakan suatu program bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Suatu program yang baik harus sesuai dengan kebutuhan dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang menjadi sasaran dari program tersebut, semakin beragam dan kompleks kebutuhan dan permasalahan dari kelompok sasaran, maka semakin rumit penyusunan suatu program. Masyarakat dalam hal ini yang menjadi kelompok sasaran mempunyai karakteristik tertentu. Masyarakat memiliki kebutuhan dan minat yang beragam, kemampuan mereka dalam menganalisis situasi yang dihadapi juga beragam, dan juga kemampuan mereka dalam mengambil keputusan juga tidak sama antara kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya.<sup>10</sup>

Semenjak munculnya pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Desa Blimbing terus berupaya dalam mengeksplorasi potensi yang ada hingga pada tahun 2014 mendapat suatu bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) untuk memulai usaha pengembangan desa melalui program animas. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sutrisno selaku Kepala Desa Blimbing, Saat ini pengelolaan dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini melibatkan masyarakat, sehingga pihak pemerintah desa hanya sebatas mengarahkan dan memfasilitasinya saja.<sup>11</sup> Di samping sebagai pengelola BUMDes masyarakat Blimbing juga ikut berkontribusi dalam hal partisipasi pembangunan sarana dan prasarana dan juga partisipasi dalam bentuk materi.

Kegiatan yang dilaksanakan desa Blimbing dalam program PSBM yaitu berupa pembangunan IPAL komunal berbasis masyarakat. Dalam program tersebut, pelibatan masyarakat secara aktif dari awal pelaksanaan sampai dengan tahap pasca konstruksi, khususnya dalam hal operasi dan

---

<sup>10</sup> Aziz Muslim. *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Teras Kompleks POLRI Gowok Blok D 2 NO. 186, 2009). hal. 119

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Sutrisno (Kepala Desa Blimbing), pada tanggal 29 April 2019

pemeliharaannya sangat memerlukan penilaian keberhasilannya, sehingga prasarana sanitasi yang dibangun akan tetap terpelihara dengan dukungan masyarakat.<sup>12</sup> Keberhasilan pelaksanaan program PSBM baik ditinjau dari segi pembangunan fisik dan non fisik akan membantu pemerintah desa dalam rangka penyediaan sanitasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil yang baik dari program yang berbasis masyarakat akan tercapai jika masyarakat berpartisipasi aktif di dalam kegiatan. Dengan berpartisipasi aktif, akan tumbuh rasa saling memiliki terhadap apa yang telah mereka bangun, sehingga nantinya akan terus berkelanjutan dan berkesinambungan.<sup>13</sup>

Hal ini yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat (PSBM) di Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal”, sebagai karya ilmiah akademik.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana hasil partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan :

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Mukkhoirin (Ketua BUMDes Blimbing), pada tanggal 19 September 2019

<sup>13</sup> Rahmat Peronema, “*Partisipasi dalam Pengelolaan Air Limbah Program SPMB di Desa Bangunjiwo*”, 2016. Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>



- a. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat di desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.
- b. Untuk mengetahui dampak partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau pengetahuan dan pengembangan dalam keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat.
- b. Manfaat praktis, penelitian ini dapat dijadikan contoh pelibatan masyarakat dalam program-program pemberdayaan masyarakat. Disamping itu penelitian ini juga dapat memberikan sumbangsih keilmuan dalam tahapan partisipasi masyarakat.

## D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan kajian yang peneliti lakukan, ada beberapa pendapat yang menyatakan tentang partisipasi masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut :

**Pertama**, penelitian yang dilakukan oleh Irma Purnamasari, Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro dalam tesis yang berjudul “*Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi*”.<sup>14</sup> Tujuan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, mendalami praktik musrenbang ruang masyarakat untuk berpartisipasi sangat terbuka mulai tingkat desa sampai kabupaten bahkan ditingkat nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>14</sup> Irma Purnamasari, “*Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi*”, dalam Tesis Program Pascasarjana UNDIP Studi Ilmu Administrasi, 2008

partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak masih rendah. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Rendahnya partisipasi masyarakat akan mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan perencanaan pembangunan, yang berarti peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi, politik, lingkungan masyarakat yang salah satunya tercermin dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat belum tentu terlaksana dengan baik. Perbedaannya dengan skripsi ini adalah terletak pada objek yang dikaji yaitu antara perencanaan pembangunan dan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat.

**Kedua**, penelitian yang dilakukan oleh Djunaidi Mustofa dalam tesis yang berjudul "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sarana Air Bersih di Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muaraenim*".<sup>15</sup> Tujuan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan melalui program pamsimas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang langkah-langkah dalam pengelolaan sanitasi, dan juga partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pamsimas yang ada di kecamatan Tanjung Agung di kabupaten Muaraenim. Dari hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya kapasitas masyarakat dan sumber daya alam dalam pengelolaan prasarana masih cukup rendah untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan prasarana yang dibangun. Kurangnya air bersih yang merupakan kebutuhan dasar manusia merupakan dorongan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri secara komunal untuk mempertahankan diri. Kebutuhan komunal yang tidak terpenuhi itulah yang memicu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat membutuhkan kesadaran yang tinggi pada masyarakat untuk memulai suatu proses kegiatan, sehingga dapat menghasilkan sebuah kesepakatan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama serta dapat menjamin keberlanjutan. Persamaan tesis Djunaidi Mustofa dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang peran serta

---

<sup>15</sup> Djunaidi Mustofa, "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sarana Air Bersih di Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muaraenim*", dalam tesis Ilmu Lingkungan Undip, 2010

masyarakat dalam pengelolaan sanimas serta dari pihak pemerintah ikut berkontribusi dalam mengawal dan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan suatu objek tertentu. Perbedaannya terletak pada objek yang dikaji yaitu antara pengelolaan sarana air bersih dan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat serta lokasi penelitian yang berbeda.

**Ketiga**, penelitian yang dilakukan oleh Suranti dalam skripsi yang berjudul "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pantai Baru Dusun Ngentak, Poncosari, Srandaan, Bantul*".<sup>16</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terbentuknya pantai baru dan menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan pantai baru dusun Ngentak yang dilaksanakan oleh pengelola Pantai Baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pantai baru sangatlah totalitas, semua warga terlibat langsung dalam pembangunan fasilitas untuk pembangunan pantai baru, baik dari kalangan bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi pun ikut berpartisipasi di dalamnya. Jenis partisipasi masyarakat yang diterapkan di pantai baru dan bentuk-bentuk partisipasinya yaitu partisipasi kemitraan. Penulis dalam penelitian ini lebih berfokus pada dampak sosial-ekonomi yang akan dinikmati hasilnya oleh masyarakat Dusun Ngentak dengan adanya program dari pemerintah yaitu program pengembangan pantai baru yang dilaksanakan atas partisipasi masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada objek yang dikaji yaitu antara pengembangan pantai baru dan pengembangan desa melalui pelaksanaan program pengelolaan sanitasi yang berbasis masyarakat.

**Keempat**, penelitian oleh Christy Widyawati dari jurnalnya dengan judul "*Peranan Partisipasi Lokal Dalam Pengembangan Wisata*

---

<sup>16</sup> Suranti, "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pantai Baru Dusun Ngentak, Poncosari, Srandaan, Bantul*", dalam Skripsi Fakultas Dakwah, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri, 2013

*Heritage di Trowulan*".<sup>17</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pendapat, sikap dan tingkat kesadaran masyarakat lokal, peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan, serta tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan wisata heritage di Triwulan dalam program pengembangan wisata heritage yang bermuara pada upaya peningkatan wisata heritage berbasis peran serta masyarakat lokal. Informasi mengenai peran masyarakat tersebut digali melalui persepsi yang terbentuk dalam masyarakat Trowulan dalam memandang pentingnya heritage di Trowulan, kesempatan untuk berpartisipasi dan dampak yang diharapkan dari pengembangan wisata heritage terhadap masyarakat Trowulan itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dari hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa penelitian ini mengamati sikap, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat lokal yang memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas wisata heritage di Trowulan, namun antusiasme untuk terlibat dan berpartisipasi masih belum terlalu optimal. Bentuk keterlibatan masyarakat masih sebatas pada tataran operasional saja dan jarang dilibatkan dalam fase awal perencanaan. Oleh karena itu, peningkatan upaya kolaborasi yang berkualitas dan intensif dengan pihak pemerintah daerah dan swasta merupakan salah satu cara yang layak dilakukan untuk lebih memotivasi masyarakat lokal sebagai salah satu pelaku utama pengembangan wisata heritage. Relevansi jurnal diatas dengan skripsi ini yaitu sama-sama mengkaji soal adanya peran serta masyarakat yang dilakukan suatu kelompok masyarakat atau lembaga dalam pengembangan ekonomi. Yang menjadi perbedaan hanya pada sektor kajian yang diteliti sebagai objek penelitian.

**Kelima,** penelitian yang dilakukan oleh Trias Yunior Mediawati, dalam tesis yang berjudul "*Tingkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kabupaten Jember Jawa*

---

<sup>17</sup> Christy Widyawati, "*Peranan Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Wisata Heritage di Trowulan*", dalam Jurnal Pariwisata, Vol 5 No. 2, September 2018



*Timur*".<sup>18</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkatan partisipasi masyarakat di dalam mengelola lingkungan melalui program pnpm mandiri perkotaan yang pelaksanaannya berada di Kabupaten Jember. Metode penelitian menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif. Dari hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Jember dibutuhkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat berperan dalam fenomena prakarsa, pembiayaan, pengambilan keputusan, mobilisasi tenaga, dan penyelesaian masalah. Partisipasi masyarakat tersebut dalam tipologi tingkatan partisipasi masyarakat berdasarkan teori Arnstein berada pada tingkatan *placation* untuk prakarsa, *consultation* untuk pembiayaan, *delegated power* untuk pengambilan keputusan dan mobilisasi tenaga, serta *partnership* untuk fenomena penyelesaian masalah. Perbedaannya dengan skripsi ini terletak pada tempo waktu dan tujuan penelitian yang akan diangkat menjadi pembahasan yaitu terkait pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat di desa Blimbing, dengan pendekatan sosiologis.

Teori sosiologi yang digunakan yakni teori perilaku (*Behavioral Theory*). Teori perilaku dibangun untuk menerapkan prinsip psikologi sosial ke dalam sosiologi. Teori ini memusatkan perhatiannya pada hubungan antara akibat dari tingkah laku yang terjadi dalam lingkungan aktor dengan tingkah laku aktor.<sup>19</sup> Adapun syarat yang harus dipenuhi perilaku yang menjuru pada pertukaran sosial, yaitu: a) Perilaku harus

---

<sup>18</sup> Trias Yuniur Mediawati, dalam tesis yang berjudul "*Tingkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kabupaten Jember Jawa Timur*", dalam tesis Ilmu Lingkungan Undip, 2010

<sup>19</sup> Herabudin, *Pengantar Sosiologi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 61

berorientasi pada tujuan-tujuan yang hanya dapat dicapai melalui interaksi dengan orang lain; b) Perilaku harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tersebut.<sup>20</sup>

## **2. Definisi Konseptual**

Untuk memperjelas ruang lingkup penelitian, penulis menjelaskan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat. Dengan demikian penulis lebih fokus pada partisipasi dalam pengelolaan sanitasi di Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Oleh karenanya, berdasarkan kerangka teori yang dirumuskan oleh penulis, yaitu penelitian yang difokuskan pada :

### **a. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi merupakan suatu tingkah laku balas atau tindakan masyarakat yang merupakan wujud dari partisipasi, sikap masyarakat terhadap suatu obyek yang dapat dilihat melalui proses pemahaman, penilaian, suka atau tidak suka serta perilaku terhadap obyek permasalahan. Aspek partisipasi masyarakat dalam penelitian ini adalah tahapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

### **b. Sanitasi**

Sanitasi adalah usaha pencegahan atau pengendalian segala faktor lingkungan fisik yang dapat memberikan pengaruh terhadap manusia terutama yang bersifat merugikan serta berbahaya terhadap perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia.

## **3. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam antara lain adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer yakni informasi dari tangan pertama atau narasumber. Sedangkan data sekunder yaitu informasi

---

<sup>20</sup> Wirawan, Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial). (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 171

yang diperoleh tidak secara langsung dari narasumber, tetapi dari pihak ketiga.<sup>21</sup> Penentuan sumber data dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah para informan yang ada di Desa Blimbing yaitu Kepala Desa, Ketua BUMDes, dan masyarakat setempat yang ikut terlibat dalam pelaksanaan program kegiatan pengelolaan sanitasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder, merupakan sumber yang sudah ada dalam *setting* penelitian dan sudah dikumpulkan oleh pihak-pihak lain (orang atau institusi lain) pada waktu sebelumnya.<sup>23</sup> Data sekunder juga merupakan data yang diperoleh dari sumber data yang kedua dari data yang dibutuhkan. Dengan kata lain sumber data yang tidak langsung diperoleh dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini data sekundernya adalah berupa dokumen-dokumen, artikel, surat kabar, kajian pustaka mulai dari buku-buku, jurnal, skripsi, serta foto-foto yang mendukung kelengkapan data.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperlukan untuk menghimpun data serta informasi yang diperlukan untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti sesuai yang telah dijelaskan dalam latar belakang. Beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Eko Gugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Merdeka, 2015), hal. 87

<sup>22</sup> Ibid., hal. 88

<sup>23</sup> Fattah Hanurawan, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Psikologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Ed. 1, Cet. 1, hal. 119

#### a) Observasi

Observasi sebagai pemilihan, perubahan, pencatatan, pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme di dalam keadaan yang sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.<sup>24</sup> Creswell (2012), juga mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses dalam rangka untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukannya penelitian.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan ialah observasi pasif, yaitu dengan peneliti datang langsung di lingkungan masyarakat yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.<sup>26</sup>

Peneliti melakukan pengamatan untuk mengamati kondisi desa Blimbing serta kegiatan seperti apa yang mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat.

#### b) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab untuk memperoleh keterangan yang digunakan dan bertujuan untuk penelitian sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman.<sup>27</sup> Secara sederhana wawancara bisa dikatakan merupakan salah satu dari sekian teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung dan juga secara tidak langsung dengan yang diwawancarai.<sup>28</sup>

Penulis melakukan wawancara bebas terstruktur dengan setiap responden diberikan pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya dengan format bebas yang kemudian diajukan terhadap pihak yang terlibat dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat

---

<sup>24</sup> Ardial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal. 367

<sup>25</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 197

<sup>26</sup> Ibid., hal. 227

<sup>27</sup> Burhan mungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2001), hal. 108

<sup>28</sup> Ardial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi...* hal. 372

di desa Blimbing. Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa Blimbing, dan Masyarakat Desa Blimbing yang ikut berpartisipasi, dalam hal ini yaitu Ketua BUMDes dan masyarakat setempat yang ikut terlibat dalam proses pengelolaan sanitasi di Desa Blimbing.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses memperoleh informasi data secara langsung dari tempat penelitian melalui dokumen-dokumen yang tertulis seperti data statistik, arsip surat, serta laporan-laporan maupun catatan-catatan lainnya. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>29</sup> Dokumentasi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa dokumen tentang foto-foto kegiatan, data-data statistik, dan data struktur organisasi. Data tersebut dimaksudkan untuk melengkapi data yang belum diperoleh dari metode wawancara maupun observasi.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk menemukan dan menyusun transkrip wawancara, catatan-catatan lapangan, dan dokumentasi yang diorganisir ke dalam kategori atau pola yang akan dipelajari bersama bahan-bahan yang telah dikumpulkan penelitian juga membuat kesimpulan sehingga nantinya akan mudah dipahami baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori analisis dari Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>30</sup> Dalam proses menganalisa data kualitatif terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Sudaryono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2017), hal. 219

<sup>30</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2008), hal. 246

a. Proses mereduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila memang diperlukan.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun dalam penyajian data yang memungkinkan memberi adanya penarikan kesimpulan serta tindakan. Setelah data direduksi, maka langkah yang selanjutnya yaitu mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Penarikan kesimpulan

Penyimpulan/penarikan kesimpulan yang merupakan hasil penelitian yang diharapkan dapat menjawab berdasarkan hasil analisis data dan rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi bisa saja tidak karena masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan masih berkembang setelah penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan tentang Partisipasi Masyarakat

##### 1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Secara etimologis, istilah partisipasi berasal dari bahasa latin “*pars*” yang berarti bagian atau mengambil bagian, dan bisa juga disebut “peran serta” atau “keikutsertaan”. Bank dunia memberi batasan partisipasi masyarakat sebagai pertama, keterlibatan masyarakat yang terkena dampak pengambilan keputusan tentang hal-hal yang harus dikerjakan dan cara mengerjakannya. Kedua, keterlibatan tersebut berupa kontribusi dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang telah diputuskan. Ketiga, bersama-sama memanfaatkan hasil program sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan dari program tersebut.<sup>30</sup> Adapun pengertian masyarakat secara epistemologis yaitu pergaulan. Dalam bahasa latin *socius* dan berubah menjadi kata sosial yang berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan pergaulan hidup.<sup>31</sup> Masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia, yang atau dengan sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain. Pengaruh dan pertalian kebatinan yang terjadi dengan sendirinya di sini menjadi unsur yang harus ada dalam masyarakat, bukan hanya menjumlahkan adanya orang-orang saja, akan tetapi diantara mereka harus ada pertalian satu sama lain.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan didalam tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pelestarian lingkungan. Disini

---

<sup>30</sup> Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Bandung: Alumni, 2011), hal. 213

<sup>31</sup> M. Daud Ali dan Habiah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 77



masyarakat tidak hanya sebagai penerima fasilitas maupun manfaat tetapi juga sebagai subjek yang berkesinambungan.<sup>32</sup>

Selain pendapat diatas, Mulyadi mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan dalam proses pengambilan keputusan maupun menjalankan suatu program, yang mana masyarakat juga ikut merasakan manfaat dari kebijakan program tersebut. Selain itu dalam melakukan sebuah evaluasi masyarakat tentunya juga ikut dilibatkan agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>33</sup>

Partisipasi masyarakat juga bisa dikatakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bahkan reaktif terhadap pembangunan dan pelaksanaan program, dengan melakukan sebuah kesepakatan, tindakan dan pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.<sup>34</sup>

Verhagen menyatakan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian : kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat.<sup>35</sup> Sebagai bentuk partisipasi dalam sebuah pengembangan, kemampuan masyarakat harus mempengaruhi kegiatan-kegiatan sedemikian rupa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena partisipasi masyarakat sering disangkutpautkan dengan pemberdayaan masyarakat yang menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat.

Jim Ife mengemukakan, bahwa secara umum dalam program pemerintah, partisipasi merupakan cara untuk menggerakkan masyarakat dan melibatkan mereka dalam meningkatkan sistem

---

<sup>32</sup> Made Heni Urmila Dewi, “*Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatihuwih Tubanan, Bali*”, dalam Jurnal KAWISTARA, Vol 3 No. 2, 2013. hal. 52

<sup>33</sup> Mohammad Mulyadi, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*, (Tangerang Selatan: Nadi Pustaka, 2009), hal. 13

<sup>34</sup> Siti Irene AD, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 62

<sup>35</sup> Aprillia Theresia, Kerisnha S. Andini dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan bagi Praktisi, akademis, dan pemerhati pengembangan masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014). hal. 197

efisiensi sistem penyampaian, serta sebagai upaya untuk menjamin peningkatan peran masyarakat dalam inisiatif-inisiatif pembangunan.<sup>36</sup>

Cohen dan Uphoff memberikan rumusan partisipasi masyarakat yang lebih aplikatif dan lebih nyata terjadi di masyarakat yaitu *Participation in decision making, Participation in implementation, Participation in benefit, and Participation in evaluation*.<sup>37</sup> Dalam rumusan partisipasi tersebut peneliti dalam hal ini menggunakan *Participation in implementation* dikarenakan sangat berkaitan dengan judul penelitian ini. *Participation in implementation* atau yang biasa disebut partisipasi dalam pelaksanaan ini merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat dilibatkan langsung dalam kegiatan pengelolaan sanitasi dengan mengemukakan pendapat dan saran dalam mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang direncanakan bersama. Karena disini masyarakat mempunyai informasi yang relevan yang tidak dapat dijangkau oleh perencanaan teknis atasan.

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat secara sadar dalam proses pembangunan dan pengembangan dalam rangka mencapai suatu kondisi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian masyarakat juga ikut untuk berperan serta secara langsung dan aktif dalam aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Wujud dari partisipasi dapat berupa saran, jasa, ataupun dalam bentuk materi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suasana demokratis.

---

<sup>36</sup> Jim Ife dan Frank Tosoriero, *Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi Community Development...* hal. 296

<sup>37</sup> Mohammad Mulyadi, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa...* hal. 25

## 2. Tujuan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dari sudut pandang pemerintah dengan biaya semurah mungkin, sehingga sumber dana yang terbatas dapat dipakai untuk kepentingan sebanyak mungkin. Alasan-alasan efektivitas dan efisiensi dengan adanya partisipasi masyarakat yang nyata dapat disimpulkan sebagai berikut<sup>38</sup>:

1. Partisipasi masyarakat memberikan kontribusi pada upaya pemanfaatan sebaik-baiknya sumber dana yang terbatas.
2. Partisipasi masyarakat membuka kemungkinan keputusan yang diambil didasarkan kebutuhan, prioritas dan kemampuan masyarakat. Hal ini akan dapat menghasilkan rancangan rencana, program dan kebijaksanaan yang lebih realistis. Selain itu memperbesar kemungkinan masyarakat bersedia dan mampu menyumbang sumber daya mereka seperti uang dan tenaga.
3. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu komponen yang harus diikutsertakan dalam aktivitas pembangunan. Peran serta masyarakat menjamin penerimaan dan apresiasi yang lebih besar terhadap segala sesuatu yang di bangun. Hal ini akan merangsang pemeliharaan yang baik dan bahkan menimbulkan kebanggaan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan prasarana adalah proses dimana orang sebagai konsumen sekaligus produsen dari pelayanan prasarana dan sebagai warga masyarakat mempengaruhi kualitas dan kelancaran prasarana yang tersedia untuk mereka. Partisipasi lebih merupakan proses bukan produk, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, juga dapat dilakukan oleh pihak lain serta pentingnya unsur kesediaan masyarakat.<sup>39</sup>

Ada beberapa tujuan partisipasi/pelibatan masyarakat dalam pembangunan seperti: berupaya untuk memberdayakan rakyat dengan

---

<sup>38</sup> Nana Rukmana, *Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan*. (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia), 1993, hal.214

<sup>39</sup> Schubeler, *Participation and Partnership in Urban Infrastructure Management*. The World Bank.1996, hal.32

berpartisipasi dalam membangun mereka secara lebih berarti, berupaya untuk menjamin peningkatan peran rakyat dalam inisiatif-inisiatif pembangunan, serta fokus pada peningkatan kemampuan rakyat untuk berpartisipasi bukan sekedar mencapai tujuan-tujuan proyek yang sudah ditetapkan sebelumnya sebagai tujuan relatif lebih aktif dan dinamis juga sebagai proses jangka panjang.<sup>40</sup>

Sedangkan menurut Henry Sanoff<sup>41</sup> tujuan dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu:

- 1) Untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan sebagai hasilnya akan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap organisasi tertentu, hingga pada akhirnya akan menerima segala keputusan dan rencana serta akan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab.
- 2) Untuk memberikan kesempatan pada masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dengan tujuan supaya rencana, keputusan dan pelaksanaan yang dijalankan dapat diterima dengan cukup baik.
- 3) Untuk meningkatkan rasa memiliki dalam masyarakat dengan mengumpulkan orang-orang yang akan saling berbagi ide/tujuan yang sama.

### **3. Tahapan Partisipasi Masyarakat**

Cohen dan Uphoff<sup>42</sup> mengatakan bahwa di dalam partisipasi masyarakat terdapat beberapa tahapan partisipasi yang lebih nyata terjadi di masyarakat diantaranya yaitu:

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan melalui rencana pembangunan. Seperti keikutsertaan dalam menghadiri rapat

---

<sup>40</sup> Jim Ife, *Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi Community Development...* hal. 294-297

<sup>41</sup> Henry Sanoff, *Community Participation Methods in Design and Planning*. New York: John Wiley & Sons L. td. 2000, hal.9

<sup>42</sup> Mohammad Mulyadi, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa...* hal. 26

pembangunan desa, memberikan pendapatannya dalam kegiatan rapat desa, memberikan informasi pada rapat pembangunan desa, dan juga ikut serta dalam proses pembuatan keputusan. Dalam hal ini tahap pengambilan keputusan yang dimaksud ialah pada perencanaan dan pelaksanaan suatu program.

Kedua, partisipasi di dalam pelaksanaan. Partisipasi ini merupakan keterlibatan masyarakat di dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan desa bukan hanya pada tahap perencanaan tetapi pada tahap pelaksanaan ini masyarakat juga bisa memberikan kontribusi yang lebih konkrit seperti kontribusi dengan tenaga, kontribusi dalam bentuk materi, dan kontribusi sebagai anggota proyek.

Ketiga, partisipasi di dalam kemanfaatan. Partisipasi ini merupakan wujud dari peran masyarakat dalam keikutsertaan berpartisipasi di desanya dengan keikutsertaannya tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih positif bagi perkembangan pemerintah dan masyarakat desa. Bentuk keikutsertaan masyarakat tersebut dapat berupa mengikuti kegiatan dalam memelihara kebersihan rumah dan lingkungan tempat tinggal, ikut serta dalam kegiatan keagamaan, mengikuti kegiatan memelihara keamanan lingkungan secara suka rela, dan juga mengikuti kegiatan yang diadakan desa seperti kelompok usaha di bidang ekonomi.

Keempat, partisipasi dalam melakukan evaluasi. Partisipasi ini merupakan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan memberikan penilaian pada pelaksanaan hasil dari mulai tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan. Keikutsertaan dalam bentuk kritik terhadap jalannya pembangunan, memberikan argumen maupun saran terhadap jalannya pembangunan, dan yang terpenting adalah memberikan penilaian yang kemudian disampaikan kepada pemerintah desa sebagai bahan untuk evaluasi.

Sedangkan tahapan-tahapan partisipasi masyarakat menurut Yadav<sup>43</sup> yaitu:

- 1) Partisipasi dalam mengambil keputusan
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan program dan proyek-proyek pembangunan
- 3) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil dan evaluasi program dan proyek-proyek pembangunan
- 4) Partisipasi dalam berbagai manfaat pembangunan

#### 4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Totok & Poerwoko mengatakan bahwa faktor yang mungkin berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dapat didekati melalui berbagai disiplin keilmuan diantaranya yaitu: (1) Dalam konsep psikologi, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat sangat ditentukan oleh motivasi yang melatar belakangi, yang merupakan cerminan dari dorongan, tekanan, kebutuhan, keinginan, dan harapan-harapan yang dirasakan. (2) Menurut konsep pendidikan, partisipasi merupakan tanggapan atau respon yang diberikan terhadap setiap rangsangan atau stimulus, dalam hal ini respon merupakan fungsi dari manfaat atau *reward* yang dapat diharapkan. (3) Harapan dalam konsep ekonomi sangat ditentukan oleh besarnya peluang dan harga diri dari manfaat yang akan diperoleh. Manfaat itu sendiri dapat dibedakan dalam manfaat ekonomi maupun manfaat non-ekonomi yang dapat pula dibedakan dalam hal kekuasaan, kebersamaan, dan juga prestasi.<sup>44</sup>

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, diantaranya dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Faktor Internal

---

<sup>43</sup> Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespekif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 84

<sup>44</sup> Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespekif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 94

Slamet (2003), mengatakan bahwasanya faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan, dan penghasilan. Faktor internal juga dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dari dalam diri individu itu sendiri.<sup>45</sup> Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi seperti, usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya penghasilan, serta keterlibatan dalam kegiatan pembangunan yang akan berpengaruh pada partisipasi.<sup>46</sup>

## 2) Faktor Eksternal

Berbeda dengan faktor internal faktor eksternal merupakan faktor yang memungkinkan adanya suatu dorongan kepada seseorang untuk turut berpartisipasi dari luar diri individu mereka sendiri, dalam hal kehidupan sosial serta lingkungan sekitarnya. Sunarti (2003), juga mengungkapkan bahwa faktor-faktor eksternal dapat dikatakan *stakeholder*, yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kesuksesan suatu program kegiatan pengembangan desa wisata tertentu.<sup>47</sup> *Stakeholder* kunci disini yaitu siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting yang berguna untuk mensukseskan program seperti tim pendamping, sosialisasi oleh penyelenggara, aparat/pemimpin desa.

Salah satu kunci dari kesejahteraan sosial, baik secara fisik, pemikiran, material, maupun finansial yang akan meningkatkan rasa kebersamaan masyarakat lokal di dalam proses pemberdayaan

---

<sup>45</sup> Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2003). hal. 97

<sup>46</sup> Ibid., hal 137-143

<sup>47</sup> Sunarti, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan secara Kelompok*, dalam Jurnal Tata Kota. Volume 5, No. 1, Januari 2003, hal. 9



masyarakat adalah partisipasi masyarakat itu sendiri. Tanpa adanya partisipasi masyarakat suatu program tidak akan mencapai hasil yang cukup maksimal, dan pastinya dengan adanya peran partisipasi dipastikan suatu program akan membuat sebuah perubahan menuju kearah yang lebih baik.

## 5. Tipologi Partisipasi

Menurut Totok Mardikanto<sup>48</sup>, ada beberapa tipologi partisipasi, yaitu sebagai berikut:

### a) Partisipasi pasif atau manipulatif

Partisipasi jenis ini merupakan bentuk partisipasi yang paling lemah. Karakteristiknya ialah masyarakat menerima pemberitahuan apa yang sedang dan telah terjadi. Pengumuman sepihak dari pelaksana proyek tidak memperhatikan tanggapan masyarakat sebagai sasaran program. Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional diluar kelompok sasaran belaka.

### b) Partisipasi informatif

Disini masyarakat hanya sebatas menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk proyek, namun tidak mendapatkan kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses keputusan. Dan juga akurasi hasil studi tidak dibahas secara bersama dengan masyarakat.

### c) Partisipasi konsultatif

Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, sedangkan orang luar mendengarkan serta menganalisa masalah dan pemecahannya. Dalam pola ini belum ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama. Para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan masyarakat dalam hal ini juga sebagai masukan untuk ditindaklanjuti.

---

<sup>48</sup> Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespekif Kebijakan Publik...* hal. 88

d) Partisipasi intensif

Masyarakat memberikan korbanin maupun jasa dalam hal untuk memperoleh imbalan intensif berupa upah walaupun tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan. Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan setelah intensif dihentikan.

e) Partisipasi fungsional

Masyarakat membentuk sebuah kelompok sebagai bagian proyek setelah adanya keputusan-keputusan utama yang telah disepakati. Pada tahap awal, masyarakat masih bergantung pada pihak luar tetapi secara bertahap kemudian menunjukkan kemandiriannya.

f) Partisipasi interaktif

Masyarakat berperan dalam proses analisis untuk perencanaan kegiatan dan juga pembentukan atau penguatan kelembagaan. Pola ini cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis. Disini masyarakat juga memiliki peran untuk mengontrol atas pelaksanaan keputusan-keputusan mereka sehingga masyarakat memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan yang telah dilaksanakan.

g) Partisipasi mandiri

Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas untuk mengubah sistem atau nilai-nilai yang mereka junjung. Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan dan dukungan teknis serta sumber daya yang diperlukan. Yang terpenting dalam hal ini masyarakat juga memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya yang ada dan yang digunakan.

Sedangkan tipologi menurut Pretty (1995) ada tujuh tipologi partisipasi masyarakat, yaitu : partisipasi pasif, partisipasi

informasi, partisipasi konsultasi, partisipasi insentif, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif, dan partisipasi mobilisasi.<sup>49</sup>

Menurut dua sumber di atas, tipologi partisipasi tersebut menunjukkan kesamaan yaitu mulai dari tipologi pasif sampai dengan tipologi mandiri atau mobilisasi.

## **B. Tinjauan Tentang Sanitasi**

### **1. Pengertian Sanitasi**

Sanitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Sedangkan sanitasi lingkungan ialah cara menyetatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara.<sup>50</sup> Sanitasi juga bisa dikatakan sebagai alat pembuangan urin manusia dan tinja menggunakan metode pembuangan yang aman dan penyediaan fasilitas dan layanan yang memadai untuk itu.

Sanitasi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah, instansi-instansi pemerintah ataupun masyarakat terhadap pencemaran yang terjadi di darat, air, maupun udara yang memberi kontribusi dalam pelestarian lingkungan hidup serta berperan aktif dalam menghilangkan sumber vektor dan reservoir penyakit dan memutus rantai penular.<sup>51</sup>

Sedangkan menurut Chandra, sanitasi ialah bagian dari ilmu kesehatan lingkungan yang meliputi cara dan usaha individu untuk mengontrol dan mengendalikan lingkungan hidup eksternal yang berbahaya bagi kesehatan serta dapat mengancam kelangsungan hidup manusia.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Muhammad Iqbal, "Analisis Peran Pemangku Kepentingan Dan Implementasinya Dalam Pembangunan Pertanian", dalam Jurnal Litbang Pertanian, Vol. 26, No. 3

<sup>50</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>51</sup> Depkes, 2006

<sup>52</sup> TH Zafirah. *Pelaksanaan Penyelenggaraan Sanitasi Dasar di Pasar Tradisional Pringgan Kota Medan 2011*

Dengan kata lain, sanitasi merupakan perilaku hidup manusia yang disengaja dalam membudayakan kebiasaan hidup bersih dan juga sehat untuk mencegah manusia terkontaminasi langsung dengan bahan-bahan kotor yang berbahaya dengan harapan dapat menjaga serta juga bisa memperbaiki tingkat kesehatan manusia.

## **2. Ruang Lingkup Sanitasi**

Berdasarkan pengertiannya yang dimaksud dengan sanitasi ialah suatu upaya pencegahan penyakit yang menitikberatkan kegiatannya kepada usaha-usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Di dalam undang-undang kesehatan No.23 tahun 1992 pasal 22 disebutkan bahwa kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, yang dapat dengan melalui peningkatan sanitasi lingkungan, baik yang menyangkut tempat maupun terhadap bentuk atau wujud substansinya yang berupa fisik, kimia, atau biologis termasuk perubahan perilaku.

Kualitas lingkungan yang sehat adalah keadaan lingkungan yang bebas dari resiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia, melalui pemukiman antara lain tempat tinggal dan asrama atau sejenisnya, melalui lingkungan kerja antara perkantoran atau kawasan industri dan sejenisnya. Sedangkan upaya yang harus dilakukan dalam menjaga dan memelihara kesehatan lingkungan adalah obyek sanitasi meliputi seluruh tempat kita tinggal atau bekerja seperti dapur, restoran, area publik, ruang kantor, taman, rumah dan sebagainya. Menurut *World Health Organization* (WHO), sanitasi adalah pembuangan urin manusia dan tinja menggunakan metode pembuangan yang aman dan penyediaan fasilitas dan layanan yang memadai untuk itu.

## **3. Sarana dan Prasarana Sanitasi**

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana atau yang sering disebut infrastruktur merupakan suatu faktor potensial yang

sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah, karena pembangunan tidak akan sukses dan berjalan lancar tanpa dukungan prasarana yang memadai.

Sedangkan menurut Jones, bahwa prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan kota atau wilayah. Hakekat prasarana dasar lingkungan merupakan bagian dari pelayanan atau fasilitas umum. Fasilitas dan pelayanan umum ialah berbagai bentuk fisik yang berperan dalam meningkatkan kenyamanan suatu lingkungan hunian.

Fungsi prasarana sendiri adalah untuk melayani dan mendorong terwujudnya pemukiman dan lingkungan agar dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Untuk memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkan keseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkat kebutuhan dari masyarakat pengguna dan pemanfaat prasarana dalam suatu wilayah atau kawasan pada suatu waktu tertentu. Keseimbangan diantara keduanya akan mengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas.<sup>53</sup>

#### **4. Konsep Sanitasi Berbasis Masyarakat**

Sanitasi masyarakat merupakan salah satu program pembangunan prasarana air limbah yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat<sup>54</sup> melalui:

1. Keberpihakan terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah, dimana orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil yang ditujukan kepada penduduk miskin yang bermukim di pemukiman padat perkotaan/pedesaan berdasarkan kebutuhan.

---

<sup>53</sup> AdriantoBowo. *“Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Prasarana Dasar Pemukiman yang bertumpu pada Swadaya Masyarakat di Kota Magelang”*, dalam Tesis Semarang, Undip. hal.15

<sup>54</sup> Ibrahim Surotinojo, *“Partisipasi Masyarakat dalam Program Sanimas di desa Bajo kecamatan Tilamuta kabupaten Boalemo, Gorontalo”*, dalam Tesis Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Undip. hal. 45

2. Otonomi dan desentralisasi, dimana masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan dan pengelolaan hasilnya.
3. Mendorong prakarsa lokal dengan iklim keterbukaan, dimana masyarakat menyampaikan permasalahan dan merumuskan kebutuhannya secara demokratis dan transparan.
4. Partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan, dan pengelolaan.
5. Keswadayaan, dimana kemampuan masyarakat menjadi faktor pendorong utama dalam keberhasilan kegiatan, baik proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan hasil kegiatan.

Fokus kegiatan sanimas ialah penanganan air limbah rumah tangga khususnya tinja manusia, namun tidak menutup kemungkinan untuk menangani limbah cair industri rumah tangga yang dapat terurai secara alamiah seperti industri tempe, tahu dan sejenisnya. Melalui pelaksanaan sanimas ini, masyarakat memilih sendiri prasarana dan sarana air limbah pemukiman yang sesuai, ikut aktif menyusun rencana aksi, membentuk kelompok dan melakukan pembangunan fisik termasuk mengelola kegiatan operasi dan pemeliharaannya.

Konsep sanimas yaitu memfasilitasi dan membantu masyarakat dan pemerintah daerah untuk merencanakan juga melaksanakannya serta mengoperasikan dan merawat infrastruktur air limbah yang mereka pilih, sehingga infrastruktur air limbah yang dibangun akan menjadi contoh pembangunan sanitasi berbasis masyarakat di daerah padat yang kumuh dan rawan penyakit. Adapun prinsip-prinsip pelaksanaan program sanimas<sup>55</sup> yaitu:

- a. Pendekatan tanggap permintaan (*Demand Responsive Approach*). Dengan pendekatan ini, tenaga ahli sanimas hanya akan membantu dan memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan

---

<sup>55</sup> Ibid., hal. 47-49

sanimas yang mengemukakan permintaan dengan eksplisit. Indikator permintaan yaitu pernyataan minat, surat pernyataan tertarik, perjanjian kerjasama alokasi kontribusi dan partisipasi yang tinggi.

- b. Seleksi sendiri ialah hasil dari pendekatan tanggapan permintaan (DRA). Salah satu persyaratannya yaitu daerah calon penerima program harus memiliki masyarakat yang berpengalaman melaksanakan proyek gotong royong, serta menunjukkan komitmen aktif dan siap untuk menyediakan waktu dan sumber daya dan mempunyai peluang yang lebih besar untuk terpilih.
- c. Pilihan berdasarkan informasi lengkap. Kebutuhan akan infrastruktur sanitasi dijelaskan secara rinci kepada para stakeholder dan masyarakat berdasarkan katalog “Pilihan Lengkap”, serta ruang lingkup dan pilihan implementasi, teknis sanimas. Para tenaga ahli akan memfasilitasi masyarakat untuk memilih alternatif praktis yang dibutuhkan setelah menerima informasi tentang atribut penting sejumlah sistem dan komponen infrastruktur sanimas yang sesuai. Katalog “Pilihan Berdasarkan Informasi Lengkap” mendukung suatu berkelanjutan sistem, artinya berumur lebih lama, berfungsi lebih efisien dan lebih terawat jika sistem tersebut benar-benar mewakili pilihan masyarakat dan stakeholder lokal. Katalog diatas berguna untuk membantu mengidentifikasi pilihan infrastruktur sanitasi yang cocok, dan juga memfasilitasi penilaian berbagai komponen sistem infrastruktur sanitasi sesuai dengan pilihan stakeholder, serta sebagai alat yang kuat untuk perencanaan bottom-up secara teknis dan referensi untuk mendapatkan gambaran singkat tentang informasi teknis secara menyeluruh.

Kriteria berdasarkan pilihan teknis juga harus mempertimbangkan kapasitas, biaya, kemudahan, pengoperasian, perawatan, potensi dan keandalan.

- d. Partisipasi dan pelatihan. Kegiatan animas merupakan program pemberdayaan bagi para stakeholder dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur sanitasi berbasis masyarakat, sehingga perlu dilakukan pelatihan ke Lembaga Fasilitas Lokal (LFA) dan masyarakat dalam hal organisasi dan pengembangan kelembagaan, identifikasi, seleksi dan implementasi pilihan teknis serta pengoperasian dan perawatan infrastruktur animas yang terbangun.
- e. Kontribusi yang utama bersumber dari stakeholder berupa alokasi dana dan sumber daya manusia dan dari masyarakat berupa kontribusi uang atau tenaga yang juga sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan sanitasi berbasis masyarakat. Karena program tersebut dirancang sebagai proyek pelayanan atau fasilitasi, maka sanitasi berbasis masyarakat hanya akan menyediakan kekurangannya apabila stakeholder dan masyarakat tidak mampu untuk menutup seluruh biaya konstruksi.



### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Keadaan Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Blimbing**

Desa Blimbing adalah Desa peninggalan belanda yang datang dari beberapa Daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan terdiri dari lima Dusun pada mulanya berasal dari hutan kawasan Negeri Ngayogyakarta. Pada tahun 1937 datangnya penduduk sejumlah 45 KK dan sebanyak 135 jiwa, kemudian pada tahun 1939 datang lagi sejumlah 100 KK sama dengan 325 jiwa, diantara dua tahun berturut-turut tersebut jumlah penduduk keseluruhan yaitu sebanyak 145 KK sama dengan 460 jiwa yang nantinya akan membuka dan menggarap tanah yang telah disediakan oleh pemerintah seluas 378,448Ha.<sup>1</sup>

Pada tahun 1945 posisi Kepala Desa dijabat oleh Wiro Admojo. Kemudian pada tahun 1945 diadakan pemilihan Kepala Desa periode selanjutnya dan yang dipercaya untuk menjabat sebagai kepala Desa adalah Taruno Wijoyo sampai dengan tahun 1949, yang selanjutnya dijabat oleh Sastro Wijoyo(1950-1955),pada tahun 1956 digantikan oleh Kromo Suparman dengan carik/sekdes Samat sampai dengan tahun 1957.

Pada tahun 1958 Soempeno menjabat Kepala Desa sampai tahun 1975 Pada tahun 1976 dijabat oleh Soekoco sampai pada tahun 1979, karena dalam menjalankan tugasnya kurang stabil maka digantikan oleh Kasmani sampai tahun 1984 kemudian Desa Blimbing terus berkembang dengan Kepala Desa Tahun (1985-1990) Kasmani Pj Kepala Desa, Tahun (1991-1995) Kasmani Kepala Desa, Tahun (1995-2001) Kasmani Kepala Desa, Tahun (2002-2007) Sutanto Kepala Desa, Tahun (2007-2008) Djuwadi sebagai Pj Kepala Desa, Tahun (2008-

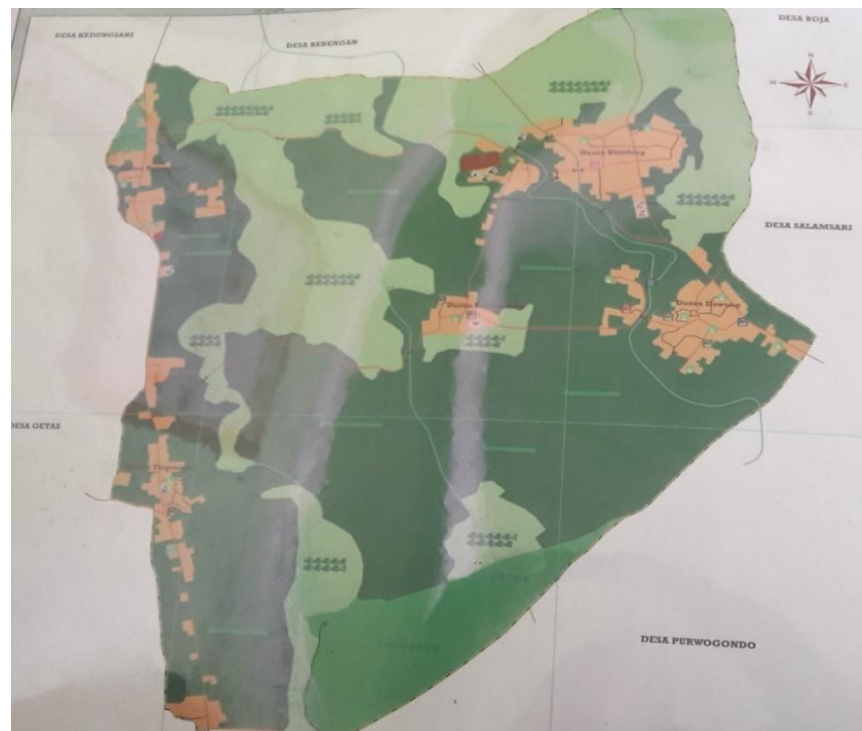
---

<sup>1</sup> Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Blimbing Tahun 2017-2022

2013) Sutanto Kepala Desa, Tahun (2013–2014) Rohkmat Nuryasin sebagai Pj Kepala Desa, Tahun (2014-2015) Wagiman sebagai Pj Kepala Desa, Tahun (2015-2016) Faisa Mukti Septiyani sebagai Pj Kepala Desa, Tahun (2017–2022) Kepala Desa Sutrisno.

## 2. Kondisi Geografis

Blimbing merupakan salah satu desa di kecamatan Boja Kabupaten Kendal Jawa Tengah, Indonesia. Desa Blimbing mempunyai wilayah seluas 378,448 Ha yang terbagi menjadi 5 Dusun, 5 RW, dan 5 RT yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memajukan Desa Blimbing.<sup>2</sup> Desa Blimbing berada di sebelah Utara Desa Boja dan Desa Bebengan, sebelah selatan Desa Salamsari, sebelah barat Desa Kaligading, sebelah timur Desa Getas. Berikut adalah gambar peta wilayah Desa Blimbing kecamatan Boja :



Gambar 1. Peta Desa Blimbing Kecamatan Boja

---

<sup>2</sup> Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Blimbing Tahun 2017-2022

Kondisi masyarakat di Desa Blimbing sangat heterogen yang berarti hampir seluruh penduduknya sangat beragam. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah tertentu dalam rangka pembinaan terhadap masyarakat secara berkesinambungan agar nantinya dapat terciptanya peningkatan dalam hal kesejahteraan masyarakat.

### 3. Kondisi Demografi

Desa Blimbing secara demografis memiliki kepadatan penduduk dengan penyebaran yang belum signifikan karena luasnya wilayah. Luas Desa Blimbing adalah 378,448 Ha yang terbagi dengan rincian: Dusun Blimbing 8 RT, Dusun Dawung 5 RT, Dusun Keconombo 2 RT, Dusun Tlogourang 4 RT, dan Dusun Nglarangan 5 RT.

Tabel 1. Data Jumlah penduduk

No.	Keterangan	Jumlah Penduduk
1	Jumlah Jiwa	2764
2	Jumlah KK	971

Jumlah penduduk desa Blimbing berdasarkan tabel di atas adalah 2.764 dengan jumlah 971 KK. Jumlah penduduk dapat di klasifikasikan dengan perincian sebagai berikut :

a. Jumlah Penduduk menurut Umur

Tabel 2. Penduduk menurut kelompok umur

No.	Umur	Jumlah
1	0-4 tahun	326 Jiwa
2	5-9 tahun	198 Jiwa
3	10-14 tahun	197 Jiwa
4	15-19 tahun	182 Jiwa
5	20-24 tahun	234 Jiwa
6	25-29 tahun	213 Jiwa
7	30-34 tahun	245 Jiwa

8	35-39 tahun	196 Jiwa
9	40-44 tahun	180 Jiwa
10	45-49 tahun	195 Jiwa
11	50-54 tahun	172 Jiwa
12	55-59 tahun	135 Jiwa
13	> 60 tahun	255 Jiwa
<b>Total</b>		2.764 Jiwa

*Sumber : Data Monografi Desa Blimbing Tahun 2018*

Berdasarkan dari uraian tabel diatas, menunjukkan bahwa banyaknya usia remaja 10-19 tahun sebanyak 379 jiwa. Usia balita yaitu antara 0-4 tahun mencapai angka 326 jiwa. Kemudian usia rentan 55 keatas mencapai 390 jiwa. Dilihat dari jumlah penduduk menurut usia yang berperan dalam partisipasi yaitu mulai dari usia 25-54 tahun.

b. Jumlah KK yang belum mempunyai Jamban dan Septik Tank

Berdasarkan jumlah penduduk di desa Blimbing yaitu 2.764 memiliki 77 KK yang belum mempunyai Jamban yaitu 54 KK, sedangkan yang belum mempunyai Septik Tank dari 77 KK ada 15 KK yang merupakan keluarga miskin. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. KK yang belum punya Jamban dan Septik Tank

No.	Belum Punya	Jumlah
1	Jamban	54 KK dari 77 KK
2	Septik Tank	15 KK dari 77 KK

*Sumber : Data Monografi Desa Blimbing Tahun 2018*

c. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan jumlah penduduk di desa Blimbing yaitu 2,764memilki tingkatan pendidikan yang berbeda-beda. Pada

dasarnya pendidikan merupakan salah satu indikator penentuan keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan. Pendidikan juga berkaitan dengan berlangsungnya peningkatan sumber daya manusia. Pendidikan pada masyarakat Desa Blimbing dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Penduduk menurut pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	795 Orang
2	Belum Tamat SD/Sederajat	126 Orang
3	Tamat SD/Sederajat	762 Orang
4	SLTP/Sederajat	467 Orang
5	SLTA/Sederajat	506 Orang
6	Diploma I/II	5 Orang
7	Akademi/Diploma III	32 Orang
8	Diploma IV/Strata 1	67 Orang
9	Strata II	3 Orang
10	Strata III	1 Orang
<b>Total</b>		2.764 Orang

*Sumber : Data Monografi Desa Blimbing Tahun 2018*

Dari uraian tabel di atas, penduduk Desa Blimbing dilihat dari tingkat pendidikan, kehidupan masyarakatnya masih belum dikatakan sejahtera karena tingkat pendidikan masih rendah. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Blimbing sebagian besar belum sekolah dikarenakan masih banyak masyarakat yang terkendala masalah biaya dan juga faktor usia. Kemudian tamatan SD/ sederajat 762 orang, pada tingkat SLTP/ sederajat sebanyak 467 orang, tingkat SLTA/ sederajat 506 orang dan kemudian penduduk yang lulusan Perguruan Tinggi sebanyak 108 orang baik itu tingkat

D-3 maupun sampai S-3. Hal ini berdampak terhadap kurang maksimalnya partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan program kegiatan dikarenakan penduduk Desa Blimbing mayoritas adalah anak-anak yang belum bersekolah.

d. Jumlah Penduduk menurut Agama

Tabel 5. Penduduk menurut Agama

No.	Agama	Jumlah
1	Islam	2.722 Orang
2	Kristen	34 Orang
3	Katolik	8 Orang
4	Hindu	-
5	Budha	-
<b>Total</b>		2.764Orang

*Sumber : Data Monografi desa Blimbing tahun 2018*

Berdasarkan uraian tabel diatas, terdapat berbagai macam agama yang dianut masyarakat desa Blimbing. Dari beberapa agama tersebut, agama Islam merupakan agama yang mayoritasnya dianut oleh masyarakat setempat. Pemeluk agama selain Islam di desa Blimbing dalam hal kegiatan keagamaan tidak terlalu nampak kelihatan. Hal tersebut dikarenakan jumlah penganutnya lebih sedikit serta tempat ibadah yang belum tersedia di desa Blimbing, sehingga setiap ada kegiatan keagamaan mereka melakukannya diluar wilayah desa Blimbing. Namun, kondisi keberagaman desa Blimbing tergolong cukup baik. Hal ini terbukti pada kerukunan dan toleransi antar pemeluk agama satu dengan yang lainnya.

e. Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat desa Blimbing cukup beragam diantaranya mulai dari karyawan swasta, karyawan BUMN, Pegawai Negeri Sipil, pedagang, buruh tani, TNI, POLRI,

dan sebagainya. Jenis mata pencaharian masyarakat desa Blimbing dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 6. Penduduk menurut mata pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	781 Orang
2	Mengurus Rumah Tangga	349 Orang
3	Pelajar/Mahasiswa	286 Orang
4	Pensiunan	10 Orang
5	Pegawai Negeri Sipil	27 Orang
6	Tentara Nasional Indonesia	7 Orang
7	POLRI	3 Orang
8	Perdagangan	34 Orang
9	Petani	324 Orang
10	Karyawan Swasta	431 Orang
11	Karyawan BUMN	1 Orang
12	Karyawan Honorer	4 Orang
13	Buruh Harian Lepas	218 Orang
14	Buruh Tani	12 Orang
15	Pembantu Rumah Tangga	3 Orang
<b>Total</b>		2.490 Orang

*Sumber : Data Monografi desa Blimbing tahun 2018*

Berdasarkan uraian tabel diatas, mayoritas mata pencaharian masyarakat desa Blimbing ialah karyawan swasta, hal ini dikarenakan pada umumnya penduduk usia produktif cukup banyak yang pergi merantau atau bersekolah ke kota besar seperti Jakarta, kota-kota di Jawa Barat dan lain sebagainya. Sedangkan minoritas mata pencaharian masyarakat desa Blimbing yaitu BUMN. Dari sini terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat rendah karena dipengaruhi oleh kesibukan pribadi.

#### f. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Desa Blimbing Kecamatan Boja adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

- Kepala Desa : Sutrisno
- Sekretaris Desa : Susilowati
- Kepala Urusan Umum : Tritaswedi
- Kepala Urusan Keuangan : Eni Dwi Kurniasih
- Kepala Urusan Perencanaan : Wagiman
- Kepala Seksi Pemerintahan : Syamsudin
- Kepala Seksi Peyannan : Rohadi
- Kepala Seksi Kesra : Ahmad Mustholih
  - Kepala Dusun I : Jumarlan
  - Kepala Dusun II : Akrom
  - Kepala Dusun III : MiftaChurrohmah
  - Kepala Dusun IV : Joko Sugiarto

#### 4. Potensi Unggulan Desa Blimbing

Potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua; Pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan karakteristik corak dan interaksinya, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial masyarakat desa serta aparatur pemerintah desa.

Potensi fisik dan nonfisik desa tersebut merupakan faktor penunjang peranan desa sebagai daerah pedalaman, yaitu daerah

---

<sup>3</sup> Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Blimbing Tahun 2017-2022



penghasil bahan-bahan pokok bagi kebutuhan masyarakat kota. Untuk mengetahui secara jelas potensi-potensi apa yang dimiliki desa tentunya perlu dilakukan pendataan secara cermat dengan melibatkan segenap *stakeholder* yang berperan serta aktif dalam pemerintahan desa.

Secara umum tujuan pengembangan potensi desa adalah untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat Desa melalui Pengembangan Potensi Unggulan dan Penguatan Kelembagaan serta Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan secara khusus tujuan pengembangan potensi desa adalah sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab
2. Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Rumah Tangga Miskin.
3. Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Membentuk, memfasilitasi dan memberikan pembinaan Pokmas UEP terutama pada aspek kelembagaan dan pengembangan usaha.
5. Mengembangkan potensi ekonomi unggulan Desa/Kelurahan yang disesuaikan dengan karakteristik tipologi Desa/Kelurahan.
6. Mendorong terwujudnya keterpaduan peran dan kemitraan antar Dinas/ Instansi Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun stakeholders lainnya sebagai pelaku dan fasilitator program.

Dalam melakukan pengembangan potensi desa perlu melibatkan partisipasi masyarakat secara proporsional. Hal ini diperlukan agar setiap program pengembangan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, mulai dari pendataan, pengkajian, pengerjaan proyek, pemanfaatan hingga pemeliharaan. Dengan mengembangkan partisipasi aktif masyarakat maka pembangunan akan menjadi lebih efektif dan efisien karena masyarakat akan lebih bertanggung jawab terhadap

---

<sup>4</sup> Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Blimbing Tahun 2017-2022

keberlangsungan pembangunan dan merasa ikut memiliki hasil pembangunan desa.

Berdasarkan pemetaan dan analisis data maupun kondisi riil yang terdapat dan dimiliki oleh masyarakat pada Desa Blimbing, dapat dijelaskan potensi-potensi yang dimiliki dan dapat dikembangkan khususnya sumber daya alam sebagai berikut:<sup>5</sup>

a. Potensi pertanian

Potensi pertanian di Desa Blimbing secara garis besar dapat dilihat dari keberagaman jenis komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang sudah sejak lama diusahakan sebagai sumber pangan dan pendapatan masyarakat. Selain itu potensi ketersediaan lahan pertanian baik persawahan maupun tegalan yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Jumlah limpahan sinar matahari dan sebaran sungai maupun mata air serta curah hujan yang cukup tinggi dan merata sepanjang tahun, sesungguhnya hal ini merupakan potensi alamiah untuk dapat memenuhi kebutuhan air pertanian apabila dikelola dengan baik dalam upaya pengembangan pertanian.

Potensi pertanian dan peternakan yang ada di Desa Blimbing Kecamatan Boja pada dasarnya masih dikelola secara *subsisten*. Potensi pertanian meliputi padi sawah dan padi gogo, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah. Sedangkan potensi peternakan yang juga merupakan ternak yang cukup besar di desa Blimbing yaitu peternakan kambing, domba, sapi, dan kuda. Dalam survei lapangan yang dilakukan terungkap bahwa dalam mengelola potensi masyarakat belum berpikir bisnis atau komersial, tetapi lebih menekankan pada kecukupan pemenuhan kebutuhan keluarga. Teknologi yang digunakan adalah teknologi sederhana. Kondisi

---

<sup>5</sup> Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Blimbing Tahun 2017-2022

demikian dapat dikaitkan dengan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah serta kecenderungan sifat penduduk desa yang belum memperhatikan perkembangan teknologi dan cenderung menerima kondisi apa adanya.

Dengan melihat potensi pertanian tanaman pangan dan populasi ternak besar yang berada di wilayah Desa Blimbing Kecamatan Boja, dapat dilihat bahwa pertanian tanaman pangan padi sawah dapat dikembangkan menjadi tanaman padi sawah organik. Selain itu, perlu dikembangkan berbagai macam produk yang berbasis sumberdaya yang ada sebagai produk yang mendukung pengembangan pariwisata. Sebagai contoh adalah pengembangan sentra industri rumah tangga berupa gula kelapa dan gula aren.

Hal tersebut dapat dicapai melalui pendekatan pemanfaatan teknologi pertanian dan ekstensifikasi produk pertanian, namun yang lebih penting adalah pola pemberian motivasi bagi para pelaku usaha tani untuk dapat menyelaraskan potensi yang dimiliki dan mengusahakannya demi kesejahteraan masyarakat. Disamping itu peran serta pemerintah dalam menyediakan infrastruktur pertanian khususnya jaringan irigasi menjadi salah satu kunci pokok keberhasilan, mengingat sebagian besar lahan pertanian sawah masih menggunakan jaringan irigasi tradisional.

b. Potensi sumber daya lingkungan alam

Potensi sumber daya lingkungan alam yang terdapat dipermukaan maupun terkandung dalam bumi di Desa Blimbing cukup menjanjikan, keindahan alam dengan bentuk topografi perbukitan dan kelestarian lingkungan pedesaan cukup terjaga oleh masyarakat. Potensi bahan tambang khususnya galian c berupa batu dan tanah urug sangat banyak dan terdapat di banyak lokasi. Hal ini tentunya menjadi tantangan dari sisi pelestarian lingkungan mengingat semakin dibutuhkannya bahan tambang galian c dalam

proses pembangunan baik oleh masyarakat, pemerintah maupun swasta dewasa ini. Antisipasi terhadap kemungkinan pemanfaatan penambangan telah dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2026, dimana wilayah Desa Blimbing telah ditetapkan sebagai daerah resapan dan kawasan lindung, untuk telah ditetapkan kebijakan pemanfaatan lingkungan alam di Desa Blimbing mengacu pada beberapa hal sebagai berikut :<sup>6</sup>

- 1) Kegiatan ekonomi yang tetap memperhatikan kelestarian ekosistem dan kawasan lindung;
- 2) Kegiatan pariwisata yang selaras dengan kegiatan pertanian atau peternakan dan industri rumah tangga dan mengoptimalkan potensi pelestarian lingkungan;
- 3) Kegiatan pemanfaatan potensi pelestarian lingkungan dengan tidak atau meminimalkan kemungkinan perusakan lingkungan terlebih jika kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan lindung;
- 4) Usaha pemanfaatan potensi sumber daya mineral yang memperhatikan kemungkinan dampaknya bagi lingkungan sekitar dan pengaruhnya bagi kegiatan lain (pariwisata, pertanian dan peternakan).

---

<sup>6</sup> Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Blimbing Tahun 2017-2022

## **B. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal**

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi diwujudkan dalam kegiatan yang nyata. Kegiatan tersebut lebih bersifat membangun kesadaran masyarakat, dimana dalam hal ini diharapkan masyarakat akan menjadi lebih paham, siap siaga, dan terlebih dalam mengelola kerentanan, kerawanan dan resiko yang akan dihadapi.

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti suatu program mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi. Partisipasi yang dimaksud dalam pembahasan ini ialah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat. Pengumpulan data tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Blimbing dapat dijelaskan dengan tahapan partisipasi sebagaimana berikut:

### **1. Tahapan Partisipasi Masyarakat**

#### **a. Tahap partisipasi pengambilan keputusan**

Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti, dalam kegiatan pengelolaan sanitasi dilaksanakan seminggu sekali, menemukan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap pengambilan keputusan, masyarakat ikut memberi saran, masukan, serta solusi untuk masalah sanitasi sembarangan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Sutrisno selaku Kepala Desa Blimbing tentang pentingnya pengambilan keputusan dari masyarakat setempat, bahwa :<sup>7</sup>

*“Keikutsertaan dari masyarakat sangat dibutuhkan dikarenakan dalam proses pelaksanaannya, adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Dan untuk keputusan akhir kami*

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno (kepala desa Blimbing), pada tanggal 29 Agustus 2019

*dari pihak pemerintah juga kami musyawarahkan kembali mas bareng-bareng bersama warga.”*

Selain itu, Bapak Mukhoirin selaku Ketua Bumdes Desa Blimbing menambahkan, bahwa :<sup>8</sup>

*“Ketika musyawarah semua warga diundang, yaitu warga yang diperkirakan terkena dampak langsung. Kemudian seluruh masyarakat ada musyawarah juga, jadi musyawarahnya di tingkat lembaga desa, terus ditingkat masyarakat kemudian habis itu baru dari pihak pemerintah melakukan sosialisasi ke masyarakat desa.”*



Gambar 2. Musyawarah warga Desa Blimbing

Dari data di atas menunjukkan bahwa partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh warga Desa Blimbing yaitu berupa pengambilan bagian dengan menyalurkan ide, tenaga, keterampilan untuk mengambil suatu keputusan yang dibuat baik dalam sebuah organisasi maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan pribadi.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mukhoirin (ketua BUMDes Blimbing), pada tanggal 24 Oktober 2019

## b. Tahap Partisipasi Pelaksanaan

Partisipasi pada tahap ini maksudnya ialah keterlibatan seseorang pada tahap pelaksanaan secara sistematis maupun non sistematis yang juga membutuhkan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat dapat memberikan bantuan berupa tenaga seperti gotong royong, maupun material bangunan berupa pipa PVC diameter 4” tipe D serta ide/gagasan sebagai suatu wujud partisipasi dalam kegiatan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan ini memang sangat dibutuhkan agar nantinya bisa menghasilkan suatu keberhasilan dari proses pengelolaan sanitasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Mukhoirin :<sup>9</sup>

*“Pada saat pelaksanaannya dari tenaga tim pelaksana kelompok keswadayaan masyarakat yang juga diambil dari tokoh-tokoh masyarakat yang nantinya akan membantu mengumpulkan warga yang rumahnya terkena langsung dari dampak pengelolaan sanitasi dan juga yang ikut memasang instalasi pengelolaan air limbah.”*

Dijelaskan pula oleh Bapak Muttaqin selaku warga Desa Blimbing tentang partisipasi dalam pelaksanaan, bahwa :<sup>10</sup>

*“Setiap satu minggu sekali untuk menyiram masal di saluran IPAL agar tidak ada kendala macet pada saluran IPAL nya, maka warga berkomitmen setiap hari jum’at itu serentak untuk menyiram pada Instalasi pengelolaan air limbah minimal tiga ember dikarenakan untuk mengantisipasi tersumbatnya saluran IPAL komunal tersebut”.*

Keterlibatan masyarakat dalam tahap pelaksanaan memanglah cukup penting mengingat masyarakat lah yang nantinya akan menikmati dari hasil tersebut. Namun masyarakat tidak dapat

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mukhoirin (ketua BUMDes Blimbing), pada tanggal 29 September 2019

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muttaqin (warga), pada tanggal 19 September 2019 di Desa Blimbing

dipaksakan kehendaknya dalam ikutserta secara penuh dikarenakan masyarakat juga mempunyai kesibukan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Di sisi lain masyarakat yang tidak ikut terlihat dalam proses pelaksanaan pengelolaan sanimas, mereka berpartisipasi dengan memberikan bantuan berupa perlengkapan pangan dalam pelaksanaannya.

### c. Tahap Partisipasi Pengambilan Manfaat

Hasil data pada tahap pengambilan manfaat, masyarakat dan pemerintah desa pada kegiatan pengelolaan sanitasi sama-sama menikmati hasil dari kegiatan tersebut. Hasil-hasil yang didapatkan yaitu berupa adanya peningkatan pemasukan ekonomi masyarakat yang rata-rata digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, lingkungan sekitar bersih dan aman dari sampah dan limbah cair rumah tangga yang terkadang masih dibuang sembarangan, pembuatan tempat pariwisata yang juga menyokong ekonomi masyarakat, serta hubungan antar warga semakin membaik dan adanya rasa percaya antara masyarakat desa Blimbing dengan pemerintah. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Bapak Mukhoirin selaku Keuta BUMDes, beliau mengatakan, bahwa :<sup>11</sup>

*“Untuk pengambilan manfaatnya hanya masyarakat sekitar (14 KK) yang bisa dikarenakan itu berhubungan dengan kemiringan tanah mas. Jadi hal itu dimanfaatkan oleh 4 RT yaitu RT 1, RT2, RT3, dan RT 7, terus setiap warga yang ikut masang dikenakan iuran 5 ribu rupiah dalam 1 bulan.”*

Selain itu, Bapak Sutrisno selaku Kepala Desa Blimbing, beliau menambahkan:<sup>12</sup>

*“Manfaatnya ya bisa menambah pemasukan warga dalam hal berjualan makanan terutama warga yang rumahnya disamping*

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mukhoirin (ketua BUMDes Blimbing), pada tanggal 24 Oktober 2019

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno (kepala desa Blimbing), pada tanggal 29 Agustus 2019



*sungai yang ada ditengah pemukiman warga, sekarang alhamdulillah mas sudah dijadikan tempat wisata yang memanfaatkan saluran irigasi dengan panjang 450 meter ”.*

Hal serupa juga diperjelas oleh Bapak Muttaqin selaku masyarakat Desa Blimbing, beliau mengatakan bahwa:<sup>13</sup>

*“Manfaat yang bisa diambil warga terutama dari hasil tempat wisata itu, karena dengan warga yang bisa tertib dan tidak membuang sampah sembarangan sekarang sungai jadi bersih dan bisa dimanfaatkan sebagai area wisata. Dan alhamdulillah juga bermanfaat bagi ekonomi warga khususnya disekitar irigasi tubing lumayan baik karena adanya wisata tersebut warga yang tadinya tidak ada kegiatan sekarang bisa berjualan makanan.”*

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan juga pemeliharaan sebagian besar adalah memelihara saluran air yang ada di sekitar tempat tinggalnya dan juga memanfaatkan halaman rumah sebagai warung makan untuk menambah perekonomian warga. Sebagian masyarakat mempunyai tingkat partisipasi yang cukup tinggi dikarenakan masyarakat sadar bahwa berbagai upaya dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat harus dijaga dan wajib dipelihara agar nantinya dapat memberikan manfaat dalam jangka waktu yang lebih lama.

#### d. Tahap Partisipasi Evaluasi

Hasil dari wawancara dan observasi peneliti menemukan pada tahap evaluasi, dalam kegiatan pengelolaan sanitasi yang kadang dilakukan pada saat kumpulan warga dalam acara musyawarah di tingkat lembaga maupun musyawarah ditingkat desa. Hal-hal yang dievaluasi adalah pengecekan jaringan, pengecekan bak ipal, serta adanya perbaikan pada kegiatan yang telah dilaksanakan, sudah sesuai apa belum dengan kebutuhan masyarakat atau masih adakah

---

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Muttaqin (warga), pada tanggal 24 Oktober 2019 di Desa Blimbing

yang harus diperbaiki. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Bapak Mukhorin selaku Ketua BUMDes, beliau mengatakan :<sup>14</sup>

*“Kita setiap satu tahun paling lama, apakah ada kendala tidak terhadap masalah iuran, terus masalah sanitasi, biasanya persoalannya masalah greasetrapnya yang menjadi saluran utama yang terhubung langsung ke jamban warga itu tersumbat.”*

Selain itu, Bapak Sutrisno selaku Kepala Desa Blimbing menambahkan bahwa:<sup>15</sup>

*“Ada tim penanggulangan ketika terjadi macet dan juga tim khusus dalam hal perbaikan untuk mengantisipasi itu. Jadi sanitasi IPAL itu ada organisasinya. Struktur sudah dibentuk dan bagian-bagian dari masyarakat juga sudah dibagi dalam empat bagian dalam pengelolaan yaitu mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, dan bagian dalam perbaikan.”*

Keikutsertaan masyarakat dalam tahap evaluasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan persoalan masyarakat dalam menilai kesesuaian maupun kekurangan terhadap hasil dari kegiatan pengelolaan sanitasi yang berbasis pada masyarakat dan apakah sudah sesuai atau belum dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dan apabila belum sesuai maka evaluasi ini, bisa digunakan sebagai pedoman perencanaan dalam program atau kegiatan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat di masa yang akan datang agar nantinya bisa lebih sesuai dengan harapan serta kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mukhoirin (ketua BUMDes Blimbing), pada tanggal 24 Oktober 2019

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno (kepala desa Blimbing), pada tanggal 24 Oktober 2019

### **C. Hasil Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal**

Partisipasi masyarakat yang dilakukan warga desa Blimbing telah membuahkan hasil yang positif. Hasil yang ditimbulkan dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat merupakan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan juga meningkatnya perekonomian masyarakat Desa Blimbing. Berikut adalah beberapa hasil dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat, yaitu:

#### **1. Terbentuknya Wisata Tubing**

Keberhasilan di dalam pembangunan tidak hanya dapat diukur melalui nominal yang di peroleh sekelompok orang dalam pekerjaan, melainkan dengan terpenuhi dan tercukupinya beberapa hal dalam kehidupan sehari-hari juga merupakan hasil dari capaian seseorang. Seperti halnya kebutuhan ekonomi masyarakat yang dapat tercukupi melalui usaha-usaha kecil tanpa bergantung pada pekerjaan pokok. Sehingga nantinya dapat menjadi sumber pemasukan dari pekerjaan atau usaha yang lain.

Proses pengembangan ekonomi juga menurut Bapak Sutrisno selaku Kepala Desa Blimbing pada saat proses wawancara terkait dampak yang dirasakan warga atau hasil yang telah tercapai dari kegiatan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat, beliau menyatakan:<sup>16</sup>

*“Memang jikalau dilihat secara langsung hasil dari proses pengembangan ekonomi melalui usaha kecil seperti membuka warung makan di sekitar area wisata, hasilnya tidak dapat dilihat secara langsung mas. Hal itu dikarenakan yang namanya proses pengembangan kan tidak langsung jadi ya mas, akan*

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno (kepala desa Blimbing), pada tanggal 24 Oktober 2019

*tetapi butuh tahapan dan waktu jangka panjang untuk menikmati serta merasakan hasilnya.”*

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa kebutuhan masyarakat Desa Blimbing dapat ditopang melalui usaha-usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat agar mendapat pendapatan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang lain.

Tingkat pengangguran masyarakat Desa Blimbing mengalami penurunan dan sudah berkembang daripada sebelumnya. Sebagai contoh, para ibu rumah tangga yang dulunya menganggur dan hanya mengandalkan penghasilan pokok para suami, sekarang dapat mendapatkan pendapatan tambahan dari hasil membuka warung-warung makanan disekitar lingkungan area wisata.



Gambar 3. Tempat Wisata Tubing Bumi Parikesit

Terhitung ada 5 warga yang rumahnya tepat disamping area wisata, yang mampu berkontribusi di dalam pengembangan ekonominya dengan memanfaatkan lingkungan/area wisata tubing untuk berjualan makanan. Bapak Heri selaku warga Desa Blimbing mengatakan :<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Heri (warga), pada tanggal 19 September 2019

*“Dulu sebelum ada tempat wisata lumayan susah mas untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Soalnya ya pekerjaan warga setiap hari kebanyakan ya sebagai petani, itupun hanya bapak-bapak saja, sedangkan ibu-ibu hanya mengurus rumah, momong anak, dan sesekali membantu di sawah. Tapi sekarang setelah adanya tempat wisata, ya alhamdulillah kebutuhan ekonomi masyarakat sekarang lebih tercukupi.”*

Dari data di atas menunjukkan bahwasanya dengan terbentuknya tempat wisata bisa dikatakan perkembangan ekonomi masyarakat semakin meningkat dan memberi dampak di dalam tercukupinya kebutuhan primer masyarakat, serta membantu masyarakat dalam memanfaatkan kesempatan bekerja ataupun mencari sumber penghasilan tambahan melalui program-program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

## **2. Mengurangi Pencemaran Lingkungan**

Timbulnya kesadaran masyarakat desa Blimbing akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Sutrisnoselaku Kepala Desa Blimbing :<sup>18</sup>

*“Dulu masyarakat sering membuang sampah di sungai atau selokan mas, sehingga lama kelamaan aliran airnya terhambat dan tercemar. Akibatnya, sampah akan menumpuk dan membusuk. Sampah yang membusuk selain menimbulkan bau tidak sedap juga akan menjadi tempat berkembangnya berbagai jenis penyakit. Nah maka dari itu salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam mengajak masyarakat untuk menjalankan pola hidup bersih dan sehat yaitu dengan tidak lagi membuang sampah sembarangan dan tidak buang limbah rumah tangga di aliran irigasi.*

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno (kepala desa Blimbing), pada tanggal 24 Oktober 2019



Gambar 4. Aliran sungai yang sudah bersih dan tidak lagi tercemar oleh sampah dan limbah rumah tangga

Pada awalnya memang masyarakat Desa Blimbing sangat tidak tertib sama sekali dalam hal membuang sampah. Para warga banyak yang belum tahu manfaat dalam mengelola limbah sampah rumah tangga dengan tepat. Namun setelah adanya bank sampah yang merupakan unit dari BUMDes, masyarakat mampu memanfaatkan limbah sampah yang mereka hasilkan dalam setiap harinya. Hal tersebut juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Mukhoirin, beliau mengatakan :<sup>19</sup>

*“Setelah adanya program kegiatan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat, dari pemerintah mengajak warga bersama-sama untuk mencegah dan menanggulangi sampah terutama sampah rumah tangga yaitu dengan memanfaatkannya menjadi pupuk kompos. Disini kan ada bank sampah juga ya mas itu ikut bumdes, nantinya sampah-sampah tersebut dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, selanjutnya sampah organik ditimbun di dalam tanah sehingga menjadi kompos. Adapun sampah anorganik seperti plastik dan kaleng bekas dapat didaur ulang menjadi alat rumah tangga dan*

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mukhoirin (ketua BUMDes Blimbing), pada tanggal 19 September 2019

*barang-barang lainnya. Kita sudah mengantisipasi pembuangan sampah pada tempatnya yaitu tiap 2 minggu sekali kita ada tim pungut sampah yang langsung diambil dan dibuang ke TPA langsung.”*

Pasifnya masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dikarenakan memang dari masyarakat sendiri belum mengetahui dan mengerti akan manfaat dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Tetapi dengan adanya pengelolaan berbasis masyarakat ini, banyak manfaat yang didapatkan masyarakat baik dari segi ekonomi maupun dari segi kebersihan lingkungan. Melalui pengelolaan berbasis masyarakat ini, sampah bisa menjadi sumber penghasilan dan secara otomatis lingkungan masyarakat pun menjadi bersih, aman, dan sehat.

### **3. Pengolahan Limbah menjadi Pupuk Organik**

Salah satu hal yang menjadi permasalahan pokok di Desa Blimbing ialah limbah buangan rumah tangga yang memenuhi saluran air yang menimbulkan bau dan menjadi sarang penyakit. Limbah tersebut dapat diolah dengan proses fermentasi dengan menggunakan teknologi budidaya pertanian untuk meningkatkan kesehatan dan kesuburan tanah yang nantinya bisa bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman menjadi pupuk organik. Pupuk organik yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai media tanam untuk pengembangan pertanian organik lahan sempit di Desa Blimbing Kecamatan Boja.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Mukhoirin selaku Ketua BUMDes serta merangkap jabatan sebagai ketua KKM (Kelompok Keswadayaan Masyarakat) Ngudi Resik di Desa Blimbing, beliau mengatakan, bahwasanya :<sup>20</sup>

*“Untuk mengolah limbah buangan ini tidak mudah mas, terutama untuk padatnya. Hal itu beralasan karena kebiasaan warga yang banyak menggunakan air saat buang air besar atau*

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mukhoirin (ketua BUMDes dan KKM Ngudi Resik), pada tanggal 24 Oktober 2019 di lingkungan SD Negeri 2 Blimbing

*kecil. Akibatnya limbah cair dan padat itu tercampur air sehingga lolos dari saringan. Untuk menahan kotoran agar mengendap diatas saringan, kami menggunakan kain sablon yang lebih keras mas, karena dulu kami melapisi menggunakan kain sifon tapi kurang efektif mas, karena kotorannya masih lolos keluar. Nah dari kotoran yang terendap itu dibiarkan kurang lebih selama 6 bulan tanpa diberikan bahan kimia karena memang nantinya hasil dari pengolahan tersebut digunakan sebagai pupuk organik yang harus terbebas dari bahan kimia apapun. Setelah 6 bulan kotoran tidak lagi bau dan lebih menyerupai tanah yang siap digunakan sebagai pupuk organik. Pupuk cair itu bisa langsung kita pakai untuk ngocir. Bisa juga kita olah airnya, kemudian kita beri tempat untuk jadi pupuk cair yang lebih baik.”*

#### **4. IPAL dibuat Lapangan Olahraga**

Kehadiran program sanimas dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) komunal membawa angin segar bagi Desa Blimbing. Sejak tahun 2015 perubahan pun sedikit demi sedikit mulai terlihat nyata. Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat semakin meningkat yang dimotori oleh Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) Ngudi Resik. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat masyarakat dapat dilihat dari kebiasaan warga yang sudah tidak lagi membuang air limbah domestik dan sampah ke sungai dan irigasi. Bahkan demi menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat, warga bersama-sama melaksanakan kerja bakti seminggu sekali.

Bahkan IPAL komunal di Desa Blimbing mampu dimanfaatkan lebih. Lahan diatas IPAL komunal bisa dimanfaatkan dan dijadikan sebuah lapangan olahraga voli yang biasa digunakan warga untuk bermain bola voli bersama. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Mukhoirin selaku Ketua BUMDes serta merangkap jabatan



sebagai ketua KKM Ngudi Resik di Desa Blimbing, beliau mengatakan, bahwa :<sup>21</sup>

*“Lapangan bola voli ini dari pengurus KKM mas, yang berpikir bahwa kalo ini sudah kita buat IPAL alangkah baiknya kalo bisa kita gunakan sebagai sarana olahraga dan rekreasi. Selain lapangan voli, pemanfaatan lain dari IPAL komunal terjadi pada sungai yang bersih. Sungai kini telah dimanfaatkan untuk tempat bermain air masyarakat, dan juga sebagai wahana tubing yang diresmikan dari 2-3 tahun yang lalu mas. Dengan demikian dengan adanya kegiatan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat tersebut warga pun mengaku terbantu dan cukup puas.”*

Hal tersebut juga diperkuat oleh Bapak Heri selaku warga Desa Blimbing, beliau mengatakan :<sup>22</sup>

*“Jadi warga yang dulu-dulu sering ada yang buang limbah rumah tangga, buang air besar, buang air kecil, buang sampah sembarangan di sungai, dengan adanya program sanimas ini sekarang sudah gak ada.”*

Dari data observasi peneliti di atas yang menunjukkan bahwa sejak adanya kegiatan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Blimbing, masyarakat setempat merasakan manfaat yang cukup baik, terutama warga yang sudah terlebih dahulu sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan masyarakat.

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mukhoirin (ketua BUMDes dan KKM Ngudi Resik), pada tanggal 19 September 2019

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Heri (warga), pada tanggal 19 September 2019

**BAB IV**  
**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM**  
**PENGELOLAAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DI DESA**  
**BLIMBING KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL**

**A. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat**

Partisipasi menurut Timothy yaitu suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan didalam tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pelestarian lingkungan.<sup>1</sup> Disini masyarakat tidak hanya sebagai penerima fasilitas maupun manfaat tetapi juga sebagai subjek yang berkesinambungan.

Sedangkan Mulyadi mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan dalam proses pengambilan keputusan maupun menjalankan suatu program, yang mana masyarakat juga ikut merasakan manfaat dari kebijakan program tersebut.<sup>2</sup> Selain itu dalam melakukan sebuah evaluasi masyarakat tentunya juga ikut dilibatkan agar nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan peran aktif dan sukarela baik dalam alasan dari pribadi masyarakat sendiri maupun alasan dari luar yang secara keseluruhan mempunyai proses yang saling bersangkutan. Dalam hal ini untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh setiap individu dan masyarakat secara keseluruhan, agar terciptanya lingkungan yang bersih, aman, nyaman, dan sehat.

Partisipasi masyarakat dalam mengelola kebersihan lingkungan masyarakat melalui kegiatan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat

---

<sup>1</sup> Made Heni Urmila Dewi, “*Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tubanan, Bali*”, dalam Jurnal KAWISTARA, Vol 3 No. 2, 2013. hal. 52

<sup>2</sup> Mohammad Mulyadi, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa...* hal. 13

yang sudah dilakukan masyarakat melalui tahapan partisipasi, maka peneliti menemukan bahwasanya partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Blimbing sudah melalui semua tahapan, mulai dari tahap perencanaan kegiatan dan pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan kegiatan, tahap pengambilan manfaat dan menikmati hasil serta sampai pada tahap evaluasi. Tahapan-tahapan partisipasi tersebut dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat pada saat sebelum dan sesudah program kegiatan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat berlangsung.

### **1. Tahapan Partisipasi**

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat dilakukan melalui semua tahapan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh warga di Desa Blimbing Kecamatan Boja, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pengambilan manfaat sampai tahap evaluasi. Tahapan partisipasi ini dilakukan sebelum dan sesudah program kegiatan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat berlangsung. Partisipasi masyarakat pada tahap pengambilan keputusan masyarakat ikut terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dilibatkan dalam setiap pelaksanaan program kegiatan.

#### **a. Tahap pengambilan keputusan dalam kegiatan pengelolaan sanitasi Berbasis masyarakat**

Tahap pengambilan keputusan yang dilaksanakan dalam forum musyawarah warga yang dimaksud disini yaitu pada perencanaan dan pelaksanaan suatu program dan pada tahap ini masyarakat diajak untuk ikut menghadiri rapat yang diadakan oleh pemerintah desa baik ditingkat masyarakat maupun ditingkat lembaga desa.

Dalam rapat yang membahas tentang program pembangunan prasarana desa tersebut, diharapkan masyarakat bisa menyalurkan sumbangsih pikiran berupa usulan, saran, dan mengikuti penentuan hasil muyawarrah agar nantinya bisa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Keputusan yang dihasilkan dari hasil

musyawarah desa yaitu warga desa Blimbing setuju untuk bersama-sama terlibat secara langsung di dalam merealisasikan program pembangunan prasarana yang akan dilaksanakan oleh pihak pemerinah desa dan juga warga siap berkomitmen untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak lagi membuang air besar dan air kecil serta tidak membuang sampah sembarangan di aliran sungai dan irigasi. Partisipasi pada tahap ini dapat menjadi pembelajaran masyarakat untuk berani menyurakan pendapat dalam hal pengambilan keputusan, karena nantinya hal tersebut akan menyangkut atau mempengaruhi hidup dan penghidupan masyarakat itu sendiri.



Gambar 7. Musyawarah tingkat Lembaga Desa Blimbing Boja Kendal

Antusias masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan ini memiliki pengaruh besar terhadap kegiatan partisipasi lainnya yang juga pada tahap pengambilan keputusan. Hal ini dibuktikan dengan cukup banyaknya masyarakat yang memahami maksud serta tujuan dari program yang dijalankan. Tujuan yang dimaksud disini ialah

dari pihak penyelenggara program mengajak masyarakat untuk bersama-sama dalam menjaga kesehatan serta menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta untuk menambah penghasilan tambahan warga setempat dan menumbuhkan kerukunan antar sesama masyarakat Desa Blimbing.

Sebelum adanya kegiatan pengelolaan sanimas warga acuh tak acuh dalam membuang sampah dan buang air besar, air kecil di aliran sungai. Hal ini dibuktikan dengan tercemarnya saluran irigasi yang mana tempat itu merupakan tempat yang sering digunakan untuk mandi atau mencuci warga. Tetapi Sesudah adanya program kegiatan tersebut, warga sudah merasakan manfaat yang cukup baik terutama perilaku warga yang sudah menjalankan pola hidup bersih dan sehat. Sehingga lingkungan masyarakat Desa Blimbing sekarang sudah aman, sehat, dan terjaga dalam hal kebersihannya.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwasanya masyarakat mempunyai peran yang cukup penting dalam hal pelaksanaan program kegiatan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat, agar kedepannya dapat tercipta suatu kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Blimbing.

b. Tahap partisipasi pelaksanaan dalam kegiatan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat

Partisipasi dalam pelaksanaan ini membutuhkan sumber daya manusia untuk menunjang keberhasilan pembangunan maksudnya dengan lebih banyak menggunakan tenaga dan pikiran manusia. Masyarakat di Desa Blimbing berpartisipasi langsung di dalam pelaksanaan program pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat dengan cukup antusias. Bahkan warga lebih mementingkan

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno (kepala desa Blimbing), pada tanggal 24 Oktober 2019

kebutuhan bersama dengan saling membantu, bekerja sama dan saling memiliki rasa gotong royong yang cukup tinggi.

Dalam tahap pelaksanaan partisipasi masyarakat dapat terlihat pada kesediaan masyarakat dalam memberikan kontribusi berupa tenaga, uang, serta ide atau gagasan sebagai suatu wujud partisipasi dalam kegiatan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat mengingat kegiatan yang dilaksanakan yaitu berupa pembangunan prasarana, yang pada akhirnya masyarakat juga lah yang nantinya akan menikmati hasil dari pembangunan tersebut.<sup>4</sup>

Keterlibatan di dalam setiap tahapan proses pembangunan dan pengelolaan prasarana yang berhasil dibangun nantinya akan timbul rasa memiliki dari masyarakat itu sendiri, sehingga akan muncul kesadaran diri dari masyarakat dalam berpartisipasi. Dengan begitu tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan bisa dikatakan cukup tinggi.

Dilihat dari bentuk partisipasinya, masyarakat berada pada partisipasi vertikal dimana masyarakat sudah menjalankan tanggung jawabnya dan juga sudah mengikuti arahan-arahan dari pihak penyelenggara program. Partisipasi yang dilakukan masyarakat Desa Blimbing merupakan kegiatan yang bersifat sukarela. Dari data lapangan yang peneliti dapatkan, memang tidak ada paksaan dari pemerintah desa. Selain itu, budaya warga yang saling membantu satu sama lain menjadikan proses partisipasi di Desa Blimbing dalam pelaksanaan program kegiatan sudah terbilang cukup maksimal.

c. Tahap partisipasi pengambilan manfaat dalam kegiatan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat

Pada tahapan ini masyarakat memperoleh hasil dari program pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat. Pemanfaatan ini selain

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Muttaqin (Warga), pada tanggal 19 September 2019

dilihat dari menikmati hasil pembangunan, juga dilihat pada dampak hasil pembangunan. Dalam pemanfaatan proses pembangunan setelah terlaksananya program pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat, warga Desa Blimbing melakukan kegiatan berupa pengembangan area wisata demi terciptanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang kurang mampu atau belum mempunyai pekerjaan tetap dengan menjadi pemandu wisata dan membuka warung-warung kecil serta dengan adanya tempat wisata tersebut, diharapkan dapat menambah perekonomian desa, pemasukan keuangan keluarga, dan yang paling penting lingkungan masyarakat sekitar menjadi lebih bersih. Oleh karenanya dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek yang dirasakan masyarakat maupun pemerintah desa, dapat dikatakan proyek tersebut berhasil mengenai sasaran.

Dengan terlaksananya program pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat tersebut, dalam tahap pengambilan manfaat ini merupakan tahap di mana masyarakat benar-benar merasakan dan menikmati hasil pembangunan yang telah terbangun. Terlepas dari hal itu diharapkan nantinya dalam pemeliharaan dan pengawasan untuk menjamin terpeliharannya fungsi pembangunan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Mukhoirin, bahwa :<sup>5</sup>

*“Dalam pemeliharaannya masyarakat membentuk sebuah tim yang di dalamnya berisikan 4 orang itu setiap 2 minggu 2 kali selalu crosscheck, mulai dari pengecekan saluran, kebersihan, dan penampungan sanitasi, apakah ada yang bocor atau tersumbat. Sedangkan dalam pengawasannya, disamping dari masyarakat yang melakukannya juga didukung dari lembaga pengelola ada organisasi yang di dalamnya terdapat badan pengawasnya.”*

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mukhoirin (ketua BUMDes Blimbing), pada tanggal 24 Oktober 2019

Dari hasil wawancara dengan Bapak Mukhoirin, bahwasanya dengan diadakannya pengawasan dan pemeliharaan diharapkan nantinya masyarakat menjadi sadar dan peduli serta bertanggung jawab terhadap pentingnya menjaga lingkungan, karena pada hakekatnya manfaat dari pembangunan desa ialah untuk kepentingan bersama.

d. Tahap partisipasi evaluasi dalam kegiatan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam tahap ini dianggap penting dan juga sebagai umpan balik yang dapat memberi sumbangan pikiran dan usulan saran pembangunan demi perbaikan di dalam pelaksanaan program selanjutnya. Dalam evaluasi ini tentunya untuk menentukan maksud dan tujuan apakah program yang telah dilaksanakan sudah tercapai atau belum dari apa yang diharapkan.

Adanya evaluasi diharapkan nantinya dapat tercapainya suatu kesimpulan mana yang harus diperbaiki baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaan program. Menurut data penulis, dalam tahapan ini yang berperan hanya pemerintah desa dan beberapa dari masyarakat setempat. Hal ini di latar belakang oleh kesibukan warga dengan rutinitas sehari-hari. Bentuk evaluasi yang digunakan adalah *participatory evaluation* yang mencakup penilaian aspek efisiensi dan relevansi proyek baik positif maupun negatif terhadap konteks pencapaian tujuan yang dilaksanakan di dalam forum musyawarah desa ditingkat lembaga dan ditingkat masyarakat. Tidak sampai disitu, masyarakat dan pemerintah juga mempunyai evaluasi untuk keberlanjutannya program. Dari hasil evaluasi yang dilakukan yaitu dengan melaksanakan pengecekan jaringan, pengecekan bak atau tampungan IPAL (Instalasi



Pengolahan Air Limbah), pengecekan pengguna atau sambungan sanitasi rumah dan pengecekan keuangan dari iuran warga<sup>6</sup>

Secara keseluruhan tahapan tingkat partisipasi masyarakat di Desa Blimbing Kecamatan Boja sudah cukup maksimal berdasarkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan prasarana yang dimulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan sampai pada tahap evaluasi. Dengan adanya forum musyawarah di tingkat lembaga maupun ditingkat desa yang juga merupakan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, serta masyarakat berkontribusi dan juga termotivasi untuk bertanggung jawab di dalam mensukseskan pelaksanaan program kegiatan demi kesejahteraan bersama dengan aksi yang nyata. Kemudian disamping hal tersebut, masyarakat berinisiatif untuk lebih giat dalam melaksanakan kegiatan dan cekatan dalam menjaga kesehatan juga kebersihan lingkungan. Jadi tidak hanya setiap kali harus menunggu diarahkan oleh pihak pemerintah desa, tetapi masyarakat juga melakukan gotong royong bersama-sama demi terciptanya lingkungan desa yang bersih, sehat, aman, dan nyaman. Sehingga penyelenggara program bisa memberdayakan masyarakat melalui kegiatan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mukhoirin (Penanggung Jawab Program Sanimas), pada tanggal 24 Oktober 2019

## 2. Tipologi Partisipasi

Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif di dalam proses pembangunan.

### a. Partisipasi pasif atau manipulatif

Masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi saja pada saat rapat ditingkat masyarakat maupun ditingkat lembaga melainkan ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sanitasi. Hal ini dibuktikan ikut serta masyarakat pada saat memasang pipa jaringan dan pembuatan lahan ipal. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang disampaikan Totok Mardikanto bahwasanya partisipasi manipulatif yaitu masyarakat diberitahu apa yang sedang dan telah terjadi. Pengumuman sepihak dari pelaksana proyek tidak memperhatikan tanggapan masyarakat sebagai sasaran program, informasi yang diperukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran sehingga tidak ada kesesuaian karakteristik tipologi manipulatif dengan keadaan yang sebenarnya. Sehingga dapat dikatakan partisipasi masyarakat Desa Blimbing dalam kegiatan pengelolaan sanitasi tidak sesuai dengan teori partisipasi pasif atau manipulatif.

### b. Partisipasi informatif

Dari data observasi peneliti mendapati bahwa masyarakat tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemangku kebijakan untuk pelaksanaan setiap kegiatannya, namun masyarakat ikut terlibat yaitu dengan memberikan pendapat berupa saran atau usulan tentang pengelolaan sanitasi, serta masyarakat juga berpengaruh dalam pengambilan keputusan setelah sebelumnya dilakukan diskusi antara pengurus penanggung jawab program dengan masyarakat Desa Blimbing. Hal ini berlawanan dengan teori yang disampaikan Totok Mardikanto bahwa

partisipasi informatif yaitu masyarakat hanya sebatas menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, masyarakat tidak diberi kesempatan untuk ikut terlibat dan mempengaruhi proses penelitian, dan akurasi penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.

Pada salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah rapat ditingkat masyarakat yaitu pada kegiatan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat, semua warga diajak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan serta ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sanitasi. Sehingga dari hal tersebut tidak adanya kesesuaian karakteristik tipologi partisipasi informatif dengan keadaan yang sebenarnya di masyarakat.

c. Partisipasi konsultatif

Dari data observasi peneliti menemukan bahwa tidak hanya masyarakat yang berkonsultasi kepada pihak penanggung jawab program, namun saling timbal balik memberi saran dan masukan untuk kemajuan setiap program pengelolaan sanitasi. Terkadang masyarakat juga yang memerikan solusi atau usulan tentang apa yang sedang dialami oleh anggota penanggung jawab program pengelolaan sanitasi. Hal tersebut berbeda dengan teori dari Totok Mardikanto yang menjelaskan bahwa partisipasi konsultatif ialah masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, sedangkan orang luar mendengarkan, menganalisa masalah dan pemecahannya, belum ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama, para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan, masyarakat sebagai masukan untuk ditindaklanjuti. Sehingga dari hal tersebut tidak adanya kesesuaian dengan keadaan yang sebenarnya.

#### d. Partisipasi insentif

Pada saat pengelolaan sanitasi masyarakat memberikan korbanan jasanya untuk memperoleh imbalan berupa upah, yaitu masyarakat mendapat imbalan berupa uang dari hasil memanfaatkan sampah yang sudah dikumpulkan untuk ditabung. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan Totok Mardikanto bahwa partisipasi insentif yaitu masyarakat memberikan korbanan maupun jasanya untuk memperoleh imbalan insentif atau upah walaupun masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan, dan juga masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan setelah insentif dihentikan.

Namun ada titik perbedaan antara teori partisipasi insentif dengan partisipasi masyarakat pada kegiatan pengelolaan sanitasi di Desa Blimbing yaitu masyarakat ikut dalam setiap pembelajaran kegiatan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat yaitu pada saat pengambilan keputusan serta pada saat pelaksanaan kegiatan pengelolaan sanitasi. Sehingga ada sebagian yang sesuai dan sebagian lagi tidak cukup sesuai dengan karakteristik partisipasi insentif dengan keadaan yang sebenarnya.

#### e. Partisipasi fungsional

Sampai sekarang belum adanya kelompok yang dibentuk masyarakat setelah adanya program pengelolaan sanitasi, namun masyarakat ikut tergabung menjadi anggota penanggung jawab program. Hal ini berbeda dengan teori yang disampaikan oleh Totok Mardikanto bahwa partisipasi fungsional adalah dimana masyarakat membentuk sebuah kelompok sebagai bagian proyek dan untuk mencapai tujuan proyek, pembentukan kelompok biasanya setelah adanya keputusan-keputusan utama yang telah disepakati. Pada tahap awal masyarakat bergantung pada pihak

luar, tetapi secara bertahap masyarakat sudah menunjukkan kemandiriannya. Sehingga dalam hal ini tidak adanya kesesuaian karakteristik tipologi partisipasi fungsional dengan keadaan yang sebenarnya ada di masyarakat.

f. Partisipasi interaktif

Masyarakat Desa Blimbing memiliki peran dalam kegiatan pengelolaan sanitasi. Berdasarkan data peneliti, kurang lebih ada 13 orang yang mengikuti setiap tahapan partisipasi mulai dari ikut serta dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dengan memberikan usulan berupa ide dan gagasan dan juga ikut menyepakati serta menyetujui dari apa yang sudah di diskusikan. Dari 13 orang hanya 8 orang yang aktif dalam tahapan pengambilan keputusan. Pada tahap pelaksanaan kegiatan pengelolaan sanitasi masyarakat ikut memasang pipa jaringan, memasang bak ipal, serta ikut memasang begesing plat ipal dan penyaringan plat ipal. Dari 13 orang seluruhnya ikut aktif dalam proses pelaksanaan kegiatan pengelolaan sanitasi. Pada tahapan pemanfaatan hasil dari kegiatan pengelolaan sanitasi yaitu masyarakat mendapatkan pemasukan tambahan, yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak jarang digunakan untuk kebutuhan sosial. Lingkungan masyarakat menjadi lebih bersih dan juga masyarakat sangat terbantu dengan adanya program pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat. Pada tahapan evaluasi masyarakat memberikan masukan ataupun saran untuk lebih baiknya tentang program kegiatan pengelolaan sanitasi untuk jangka waktu yang lebih panjang. Dari 13 orang hanya 5 orang yang aktif pada tahapan evaluasi.

Hal di atas sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Totok Mardikanto bahwa partisipasi interaktif yaitu masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan juga pembentukan

serta penguatan kelembagaan, cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis, masyarakat juga memiliki peran untuk mengontrol atas pelaksanaan keputusan-keputusan mereka, sehingga masyarakat memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan. Sehingga pada tipologi partisipasi interaktif memiliki kesamaan dengan keadaan yang sebenarnya ada di masyarakat.

g. Partisipasi mandiri

Partisipasi mandiri ialah dimana masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas atau yang tidak dipengaruhi oleh pihak luar dengan tujuan untuk mengubah sistem atau nilai-nilai yang mereka junjung atau miliki. Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan juga sumber daya yang diperlukan, masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya yang ada dan yang digunakan.

Masyarakat tidak mempunyai kebebasan sendiri di dalam menentukan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan serta rencana-rencana kegiatan dalam pengelolaan sanitasi. Namun masyarakat bekerja sama dengan pihak penanggung jawab program untuk menjalankan dan mensukseskan kegiatan yang ada di Desa Blimbing Kecamatan Boja. Sehingga dalam hal ini tidak adanya kesesuaian antara karakteristik tipologi partisipasi mandiri dengan keadaan yang sebenarnya di masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam suatu program harus menciptakan keterlibatan secara aktif dari keseluruhan masyarakat tersebut di dalam proses kegiatan yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, pendekatan tipologi partisipasi masyarakat menjadi landasan dalam menganalisa sejauh mana masyarakat ikut

berpartisipasi. Dari beberapa tipologi partisipasi masyarakat hanya satu yang benar-benar sesuai antara karakteristik dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu pada tipologi interaktif.

## **B. Analisis Hasil Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat**

Hasil yang diharapkan dengan adanya partisipasi masyarakat ialah meningkatnya kemampuan setiap individu yang ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung di setiap program yang diselenggarakan oleh pemerintah yang pada pelaksanaannya mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya serta untuk jangka waktu yang lebih panjang.

Indikator partisipasi yang dipakai untuk mengukur keberhasilan partisipasi masyarakat menurut Verhagen ada 3 indikator,<sup>7</sup> yaitu:

### **1. Kewenangan**

Wewenang menurut Verhagen adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang tersebut. Jadi bisa dikatakan kewenangan adalah dasar untuk melakukan suatu tindakan dan perbuatan juga merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari atasan ke bawahan dalam suatu organisasi. Pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatannya bertugas untuk menyelenggarakan pembangunan infrastruktur desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Proses pembangunan infrastruktur akan berjalan dengan baik ketika kewenangan pemerintah desa dalam mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur secara partisipatif yang berjalan sebagaimana dengan apa yang diharapkan, untuk itu setelah kewenangan pemerintah dijalankan terhadap pembangunan

---

<sup>7</sup> Aprillia Theresia, Kerisnha S. Andini dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan bagi Praktisi, akademis, dan pemerhati pengembangan masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014). hal. 197

infrastruktur desa, masyarakat juga harus mengambil bagian atau ikut terlibat dalam proses pelaksanaannya, karena keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan program pemerintah sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan infrastruktur desa.

Menurut Bapak Sutrisno selaku kepala Desa Blimbing, beliau menyatakan bahwa, masyarakat cukup antusias dalam merespon setiap pelaksanaan program pembangunan di desa yang telah disediakan oleh pemerintah dan siap untuk dilaksanakan dari hasil yang sudah terprogram dalam rapat atau musyawarah ditingkat lembaga pemerintah juga ditingkat masyarakat dan rencana pembangunan jangkah menengah desa yang sesuai dengan kewenangan yang telah diamanahkan kepada pemerintah desa agar nantinya masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa.<sup>8</sup>

Masyarakat Desa Blimbing secara umum cukup menyadari betapa pentingnya peran partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan program kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berbagai pihak (pemerintah desa, masyarakat desa, BUMDes) pun yang ikut terlibat dalam pembangunan harus bisa menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi. Dalam hal ini partisipasi masyarakat bisa dikatakan sebagai agen perubahan untuk dapat membantuh pemerintah lebih khususnya dalam pembangunan infrastruktur desa, karena disini masyarakat merupakan pejuang bagi desa yang bertugas untuk menunjang perkembangan dan kemajuan pembangunan yang ada di desa.

Secara garis besar kewenangan dari pemerintah desa telah berjalan dengan cukup baik melalui program yang sudah ditetapkan dalam rapat atau musyawarah ditingkat lembaga juga ditingkat masyarakat maupun dalam rencana pembangunan jangkah menengah desa yang juga

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno (kepala desa Blimbing), pada tanggal 24 Oktober 2019



pemerintah sudah semaksimal mungkin untuk menjalankan amanah yang dipercayakan di dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.

## **2. Tanggung Jawab**

Untuk menunjang keberhasilan pembangunan infrastruktur sanitasi berbasis masyarakat bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah desa saja akan tetapi juga merupakan tanggung jawab dari masyarakat. Dalam hal ini merupakan tanggung jawab bersama serta pemerintah tanpa adanya keterlibatan masyarakat bukanlah sebuah pemerintah. Pemerintah desa dan masyarakat mempunyai tanggung jawab yang cukup jelas dalam setiap proses pembangunan karena adanya kesetaraan kewenangan dan keterlibatannya di dalam proses pengambilan keputusan serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan selanjutnya.

Menurut informan Bapak Mukhoirin selaku Ketua BUMDes Desa Blimbing bahwa partisipasi masyarakat Desa Blimbing di dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan prasarana sanitasi berbasis masyarakat sejauh ini cukup loyal. Masyarakat sadar bahwa dalam pembangunan infrastruktur bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi merupakan tanggung jawab masyarakat juga, disini masyarakat mempunyai peran yang cukup besar dalam kegiatan pembangunan guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang sama demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan dalam pembangunan prasarana. Namun tidak dapat dipungkiri adanya sebagian masyarakat yang kurang peka untuk melibatkan dirinya secara proaktif di dalam program pembangunan infrastruktur desa yang diselenggarakan oleh pemerintah baik dari segi tenaga maupun dari segi fasilitas.<sup>9</sup>

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur desa merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mukhoirin (ketua BUMDes Blimbing), pada tanggal 24 Oktober 2019 di Kantor Kepala Desa

maupun masyarakat yang juga harus bekerjasama dalam mensukseskan program yang akan dilaksanakan. Disini pemerintah tidak akan dapat bekerja tanpa adanya peran serta dan bantuan dari masyarakat setempat, begitu juga dengan masyarakat yang membutuhkan pemerintah dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara program.

### **3. Manfaat**

Setiap kegiatan pembangunan, diharapkan dapat memberikan manfaat yang cukup optimal terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya manfaat dari pembangunan infrastruktur desa merupakan penentu akhir dari proses partisipasi masyarakat guna tercapainya keberhasilan pembangunan yang diharapkan.

Menurut informan Bapak Muttaqin selaku warga Desa Blimbing, dari segi manfaat ekonomi, meski belum semua segmen masyarakat menikmati hasil dari program pengelolaan sanitasi, masyarakat cukup puas karena pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah desa dalam prosesnya juga melibatkan masyarakat, dengan begitu masyarakat dapat menikmati hasil dari program tersebut dan memberikan efek langsung maupun tidak langsung terhadap meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat. Manfaat sosialnya bisa menumbuhkan kembali semangat persatuan atau kebersamaan dan gotong royong masyarakat dalam program-program pembangunan selanjutnya. Manfaat psikologisnya yaitu dengan terlaksananya kegiatan pembangunan infrastruktur desa, masyarakat sekarang lebih memahami penyebab dari suatu perilaku manusia yang cenderung acuh dalam hal menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Masyarakat yang mempunyai pengetahuan yang cukup baik tentang pembangunan infrastruktur desa maka akan saling membantu baik itu untuk pihak pemerintah maupun untuk sesama masyarakat/orang lain.<sup>10</sup> Sedangkan

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muttaqin (warga), pada tanggal 24 Oktober 2019 di Desa Blimbing

manfaat dari segi lingkungan yaitu terciptanya kondisi lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat, juga dapat mencegah timbulnya penyakit-penyakit menular serta mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya polusi udara misalnya bau yang kurang sedap. Tidak hanya itu dengan terlaksananya kegiatan pengelolaan sanitasi, lingkungan masyarakat Desa Blimbing dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencemaran lingkungan dan mengurangi jumlah presentase masyarakat yang sakit di desa Blimbing.

Manfaat dari hasil pembangunan infrastruktur desa ialah untuk keseluruhan masyarakat tanpa harus memandang strata, agama, jabatan, golongan, usia, dan lain sebagainya, hal ini dikarenakan manfaat dari hasil pembangunan infrastruktur desa yaitu untuk kepentingan bersama. Pada hakekatnya keberhasilan program kegiatan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur desa merupakan keberhasilan masyarakat Desa Blimbing Kecamatan Boja yang bekerja keras dengan mengerahkan segala sumber daya serta kemandirian untuk mencapai kesejahteraan hidup yang lebih baik atas fasilitasi yang diberikan dari pemerintah.

Dilihat dari indikator yang telah dipaparkan diatas, bahwasanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan yaitu meningkatnya saling pengertian dan saling membantu antar masyarakat terutama dalam setiap peningkatan mutu pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis peneliti dari proses penggalan data yang diperoleh, terkait partisipasi masyarakat Desa Blimbing dalam pembangunan infrastruktur yaitu dengan adanya peran penyelenggara program yang telah menciptakan berbagai aturan seperti cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, hal itu dapat dijadikan sebuah landasan dalam melaksanakan proses pembangunan infrastruktur desa.

Beberapa kebijakan yang peneliti amati yang juga tertuang dalam misi arah kebijakan pembangunan, kebijakan keuangan desa, serta program dan kegiatan indikatif Desa Blimbing yaitu optimalisasi sumber-sumber pendanaan pemerintahan dan pembangunan desa untuk kepentingan masyarakat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat serta peningkatan pembangunan sarana dan prasarana desa. Hal tersebut mencerminkan bahwasanya kebijakan *Stakholder* dalam upaya mempererat tali silaturahmi masyarakat Desa Blimbing harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat guna mewujudkan visi Desa Blimbing yaitu “Bersama Masyarakat Menuju Blimbing Baru Yang Lebih Maju”. Hal tersebut juga merupakan bentuk dari partisipasi untuk mengajak masyarakat bersama-sama di dalam upaya pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian tentang “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PSBM) di Desa Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal dengan tujuan agar peneliti dapat mengetahui proses partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat, serta untuk mengetahui dampak partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal yang dalam proses kegiatannya masyarakat terlibat dalam setiap tahapan partisipasi.
  - a. Dari tahapan pengambilan keputusan, masyarakat diikutsertakan dalam pengambilannya melalui rapat atau musyawarah baik ditingkat lembaga desa dan ditingkat masyarakat maupun rencana pemangunan jangkah menengah desa. Tahapan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan cara masyarakat dilibatkan dalam pembuatan atau pemasangan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah), juga masyarakat diajak bersama-sama unuk berkomitmen dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak lagi membuang sampah sembarangan di saluran irigasi dan tidak membuang air besar maupun air kecil di sungai. Tahapan pengambilan manfaat, pada tahapan ini baik masyarakat maupun pemerintah desa sama-sama menikmati hasil dari kegiatan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat, yaitu lingkungan masyarakat menjadi lebih bersih dan aman dari sampah dan limbah cair rumah tangga serta masyarakat juga mendapatkan pemasukan ekonomi dari hasil berjualan makanan. Tahapan evaluasi, pada tahapan ini masyarakat ikut serta dalam

mengevaluasi kegiatan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat melalui pemberian masukan atau saran dan hal-hal yang dievaluasi yaitu apakah program tersebut sudah sesuai atau belum dengan apa yang diharapkan.

- b. Tipologi partisipasi masyarakat, dalam penelitian ini tipologi yang bebar-benar sesuai adalah tipologi interaktif. Tipologi interaktif ialah dimana masyarakat berperan dalam menganalisa untuk perencanaan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan, yang cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis. Masyarakat dalam hal ini memiliki andil besar dalam keseluruhan proses kegiatan, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pengambilan manfaat, dan sampai dengan evaluasi.
2. Sedangkan hasil partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal yaitu: Pertama, masyarakat yang dulunya belum mempunyai pekerjaan tetap atau pengangguran sekarang sedikit demi sedikit bisa memanfaatkan lapangan pekerjaan baru hasil dari program kegiatan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat yaitu pembuatan wisata tubing yang memanfaatkan saluran irigasi sepanjang 450 meter, disini masyarakat bekerja sebagai pemandu wisata dan juga tidak sedikit pula masyarakat yang membuka warung-warung makan kecil di pinggir kali dekat tempat wisata, sehingga dari hasil pekerjaan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kedua, mengurangi pencemaran lingkungan. Ketiga, pengolahan limbah menjadi pupuk organik. Keempat, IPAL digunakan sebagai lapangan olahraga. Lahan diatas IPAL komunal dapat dimanfaatkan dan dijadikan sebuah lapangan olahraga voli yang sekarang bisa digunakan warga untuk bermain bola voli bersama. Dengan adanya program kegiatan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat, warga Desa Blimbing telah merasakan manfaat dan menikmati hasil dari

terlaksananya program tersebut, sehingga dapat terjadi kemandirian masyarakat di dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **B. Saran-saran**

Setelah berinteraksi dan melakukan pengkajian terhadap obyek kajian penelitian ini, kiranya penulis memberikan beberapa saran yang konstruktif sehingga dapat mengembangkan proses pembangunan infrastruktur desa yang partisipatif di Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah. Pelibatan masyarakat dan tokoh masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur desa harus lebih ditingkatkan dalam setiap proses pembangunan, baik dimulai dari tahapan pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat atau pemanfaatan hasil sampai dengan tahapan evaluasi beserta pengawasan dan pemeliharaan.
2. Bagi Masyarakat. Harus lebih teliti dalam menerima program dari pihak pemangku kebijakan dan menyaring kembali informasi serta menggali terlebih dahulu permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, agar nantinya dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diharapkan serta tentunya bisa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

### **C. Kata Penutup**

Syukur alhamdulillah dalam penulisan skripsi ini telah selesai dengan cukup baik dan sederhana ini, berbagai usaha saya lakukan untuk menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi kewajiban mencapai sarjana sosial di UIN Walisongo Semarang.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sudah membantu atas terselesaikannya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari akan kekurangan yang ada pada isi maupun tulisan sehingga membutuhkan berbagai masukan guna penyempurnaan dan pengembangan keilmuan yang sesuai maupun pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Sehingga pada akhirnya dapat dijadikan referensi keilmuan baik untuk mahasiswa maupun pada pengkaji keilmuan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Rujukan Buku :

- Adisasmita Raharjo. *Pembangunan Perdesaan Pendektaan Partisipatif Tipologi Strategi dan Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013
- Ali, M.Daud, & Habiah, D. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Aprillia Theresia, Kerisnha S. Andini dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan bagi Praktisi, akademis, dan pemerhati pengembangan masyarakat*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Ardial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Atmoko T. Prasetyo Hadi. *Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman*, Jurnal Media Wisata, Vol. 12, No. 2, 2014.
- Demartoto Argyo, *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*, Surakarta Sebelas Maret University Press, 2009.
- Dwiningrum, Siti Irene A. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Gugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Merdeka, 2015.
- Hanurawan, Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Psikologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Herabudin, *Pengantar Sosiologi*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Ife, Jim dan Frank Tosoriero, *Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi Community Development edisi ketiga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Isma, Rosyida, “Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder dalam penyelenggaraan program *Corporate Social Responsibility* dan Dampaknya Terhadap Komunitas Pedesaan”. Dalam Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia. Vol.5 No.1, 2011.
- Karianga Hendra, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Bandung: Alumni, 2011.

- Laras N, Prastiti, & Rasha. *Penyuluhan Sanitasi Higiene dan PHBS pada Masyarakat Kawasan Candi Batujaya, Sebagai Dasar Membangun Desa Wisata yang Bersih dan Sehat*. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Vol 1, No. 1. 2019
- M, Sudirman. *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001.
- Mardikanto, Totok. & Poerwoko S. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespekif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Mikkelsen, Britha. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mulyadi, Mohammad. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*, Tangerang Selatan: Nadi Pustaka, 2009.
- Mungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2001.
- Muslim, Aziz. *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Teras Kompleks POLRI Gowok Blok D 2 No. 186, 2009.
- Nawawi, Hadari. *Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2006
- Ndraha, Taliziduhu. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Orocomna, Lucas, “Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa Meristim Distrik Moskona Utara)”, dalam Jurnal Governance. Vol. 5, No. 1, 2013.
- Rahmawati Diana. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Mahasiswa*. Universitas Negeri Yogyakarta. 2013.
- Rukmana, Nana. *Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1993.
- Sanoff, Sanof. *Community Participation Methods in Design and Planning*. New York: John Wiley & Sons L. td. 2000.
- Schubeler, *Participation and Partnership in Urban Infrastructure Management*. The World Bank. 1996, hal.32
- Shihab, M. Quraish, Tafsir al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati. 2012.

- Slamet, M. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2003.
- Sudaryono. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sunarti, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan secara Kelompok*, dalam Jurnal Tata Loka. 2003.
- Surotinojo, Ibrahim. “*Partisipasi Masyarakat dalam Program Sanimas di desa Bajo kecamatan Tilamuta kabupaten Boalemo, Gorontalo*”, dalam Tesis Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Undip.

#### **Sumber Internet :**

<http://blimbing.siked.id/2017/08/08/lingkungan-desa-blimbing/> diakses pada 24/08/2019 jam 10.20 WIB

<http://diskusilingkungan.wordpress.com/2013/07/10/apa-sih-manfaat-sanitasi/> diakses pada 11/07/2019 jam 21.14 WIB

#### **Sumber Wawancara :**

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Blimbing Tahun 2017-2022.

Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno (kepala desa), pada tanggal 29 Agustus 2019 di Kantor Kepala Desa Blimbing.

Hasil wawancara dengan Bapak Mukhoirin (ketua BUMDes), pada tanggal 24 Oktober 2019 di Kantor BUMDes Blimbing.

Hasil wawancara dengan Bapak Muttaqin (warga desa), pada tanggal 19 September 2019 di Desa Blimbing.

Hasil wawancara dengan Bapak Heri (warga), pada tanggal 19 September 2019 di Desa Blimbing.

## *Lampiran I*

### **DRAF WAWANCARA**

#### **A. Pertanyaan untuk Kepala Desa Blimbing**

1. Bagaimana kondisi wilayah Desa Blimbing ?
2. Bagaimana kondisi Desa Blimbing sebelum adanya program pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat ?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat ?
4. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi? Apakah dalam tahapan pengambilan keputusan, atau dalam tahapan pelaksanaan, atau tahapan pengambilan manfaat atau tahapan evaluasi ?
5. Siapa yang berperan mengambil keputusan dalam program pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat ?
6. Bagaimana keterlibatan pemerintah dalam program tersebut ?
7. Hasil dan manfaat apa saja yang didapatkan dari program tersebut ?

#### **B. Pertanyaan untuk penanggung jawab program**

1. Apakah masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat ?
2. Apa saja tahapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat ?
3. Taukah masyarakat tentang perencanaan program tersebut?
4. Kegiatan apa saja yang dilakukan masyarakat dalam mewujudkan partisipasi ?
5. Bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program ?
6. Bagaimana keterlibatan pemerintah dalam program ?

7. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi? Apakah dalam tahapan pengambilan keputusan, atau dalam tahapan pelaksanaan, atau tahapan pengambilan manfaat atau tahapan evaluasi ?
8. Siapa yang berperan mengambil keputusan dalam program pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat ?
9. Apakah masyarakat merasa diuntungkan atau dirugikan dengan adanya program pengelolaan sanitasi ?
10. Hasil dan manfaat apa saja yang didapatkan dari program pengelolaan sanitasi ?

### **C. Pertanyaan untuk Warga Desa Blimbing**

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibuk tinggal disini ?
2. Bagaimana peran dari pemerintah desa dalam menjaga kebersihan lingkungan ?
3. Apakah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa masyarakat ikut terlibat ?
4. Bagaimana masyarakat mengetahui adanya program pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat di desa Blimbing ?
5. Menurut anda apa tujuan dari adanya pengelolaan sanitasi ?
6. Siapa yang berperan mengambil keputusan dalam program pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat ?
7. Apakah masyarakat merasa diuntungkan atau dirugikan dengan adanya program pengelolaan sanitasi ?
8. Apa hasil yang didapatkan dari program tersebut ?
9. Manfaat apa saja yang didapatkan dari program pengelolaan sanitasi ?
10. Setelah adanya program pengelolaan sanitasi bagaimana hubungan antara masyarakat dengan pemerintah desa dan penanggung jawab program ?

**Lampiran II**

**Dokumentasi Observasi**

**A. Dokumentasi Wawancara**



Dokumentasi bersama Bapak Sutrisno sebagai Kepala Desa Blimbing



Dokumentasi bersama Bapak Muttaqin sebagai warga Desa Blimbing



Dokumentasi bersama Bapak Mukhoirin sebagai Penanggung Jawab Program Sanitasi Berbasis Masyarakat



## B. Dokumentasi Observasi



Tempat Wisata Tubing Bumi Parikesit



Lahan Instalasi Pengelolaan Air Limbah





Aliran sungai yang sudah bersih dari sampah dan limbah rumah tangga



Pengolahan Limbah menjadi Pupuk Organik

## **CURRICULUM VITAE**

### **Identitas Pribadi**

Nama : Muchammad Afif  
Tempat TGL Lahir : Rembang, 11 Juni 1994  
Alamat : Kebloran RT/RW 01/02, Kec. Kragan Kab. Rembang  
Email : avivmohamed@gmail.com  
Nomor HP : 081227585865

### **Riwayat Pendidikan**

Sekolah Dasar : SD Negeri 1 Kebloran Kragan Rembang  
SMP/SLTA : SMP Negeri 1 Kragan Rembang  
Madrasah Aliyah : Mathali'ul Falah Kajen Margoyoso Pati  
Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang

### **MOTTO HIDUP**

“ ISTIQOMAH LEBIH UTAMA DARIPADA SERIBU KAROMAH ”